



**AHI PRESS**



# EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM MADRASAH INKLUSI DI PROVINSI BANTEN



*Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd*

*Dr. Hj. Yuyun Rohmatul Uyuni, M.Ag*

*Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd*  
*Dr. Hj. Yuyun Rohmatul Uyuni, M.Ag*

EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM  
MADRASAH INKLUSI DI PROVINSI BANTEN

ISBN 978-979-9152-37-75



Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd  
Dr. Hj. Yuyun Rohmatul Uyuni, M.Ag

EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM  
MADRASAH INKLUSI DI PROVINSI BANTEN

AYATULLAH HUMAENI INSTITUTE

2021

EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM  
MADRASAH INKLUSI DI PROVINSI BANTEN

*Penulis:* Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd  
Dr. Hj. Yuyun Rohmatul Uyuni, M.Ag

*Editor:* Dr. Ayatullah Humaeni, MA.

*Desain Cover:* Nizar

*Tata Letak:* Romi & Kamal

*Cetakan:* Pertama, Novemeber 2021

Ukr. 14,8 x 21 Cm ~ x + 246 Hlm

---

ISBN 978-979-9152-37-75

---

*Diterbitkan Oleh:*

AHI PRESS

Jl. KH. Sohari, Link Cipare Jaya, Rt/Rw 03/21,  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang

*Email:* ahinstitute123@gmail.com

---

© Hak Cipta dilindungi Undang - Undang  
(All Right Reserved)

## KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Karena itu sudah sepatutnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala *taufik* dan *inayah-Nya*, yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga, pertama-tama patut peneliti anugerahkan kepada kedua orang tua dan para guru yang sudah mendidik, membimbing, dan mengajarkan berbagai hal tentang ilmu pengetahuan, yang telah mengantarkan penulis pada cakrawala dunia pengetahuan yang luar biasa luas. Do'a dan support istri dan keluarga juga menjadi pemicu semangat peneliti dalam berkarya.

Selanjutnya peneliti juga menghaturkan terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Islam Banten, Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin. M.Pd. yang telah memberi

kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada Dr. Hunaenah, M.Pd, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Yanwar Pribadi, MA, selaku Kepala Puslitpen UIN “SMH” Banten yang sudah mempercayakan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua dosen UIN “SMH” Banten yang memiliki motivasi dan semangat tinggi untuk belajar dan melakukan penelitian, sehingga peneliti merasa memiliki penerus yang bisa melanjutkan idealisme penelitian peneliti. Hal ini membuat peneliti masih tetap bersemangat untuk terus berkarya dan membagi ide dan gagasan, khususnya terkait dengan budaya.

Selanjutnya, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Para informan di lapangan yang sudah dengan hangat mau berbagi informasi. Juga para Peneliti Muda AH-Institute yang

sudah ikut membantu dalam pengumpulan data lapangan. Bantuan dan kerjasamanya yang baik telah memudahkan penulis untuk mengeksplorasi dan menggali data-data dan informasi yang diperlukan.

*Allahu 'alam bi al-ahawab*

Serang, November 2021

Peneliti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar – i

Daftar Isi – iv

Daftar Tabel - viii

Daftar Gambar – ix

Daftar Lampiran – x

### BAB I PENDAHULUAN – 1

1.1. Latar Belakang Masalah – 1

1.2. Rumusan Masalah – 16

1.3. Tujuan Penelitian – 16

1.4. Manfaat Penelitian – 17

1.5. Penelitian Terdahulu – 18

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA – 21

2.1. Pendidikan Inklusi – 21

2.1.1. Pengertian Pendidikan Inklusi – 21

2.1.2. Pengelompokan Pendidikan Inklusi – 32

2.2. Kebijakan Pendidikan Inklusi – 41

2.3. Siswa Berkebutuhan Khusus – 58

- 2.4. Kurikulum - 62
  - 2.4.1. Pengembangan Kurikulum - 69
  - 2.4.2. Sumber Pengembangan Kurikulum - 76
  - 2.4.3. Landasan Kurikulum - 79
  - 2.4.4. Perubahan Kurikulum - 81
  - 2.4.5. Pendekatan Perubahan Kurikulum - 83
  - 2.4.6. Desain Kurikulum - 92
- 2.5. Evaluasi Kurikulum - 93
  - 2.5.1. Evaluasi Dalam Pendidikan - 100
  - 2.5.2. Tujuan Dan Kegunaan Evaluasi - 105
  - 2.5.3. Kedudukan Evaluasi Dalam Pendidikan -  
107
  - 2.5.4. Model Evaluasi - 113
  - 2.5.5. Monitoring dan Evaluasi - 141
- 2.6. Kurikulum Madrasah Inklusi - 142
  - 2.6.1. Pengertian Kurikulum Madrasah Inklusi -  
142
  - 2.6.2. Model Evaluasi Kurikulum CIPP - 153
- 2.7. Kerangka Konseptual - 159

## **BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN - 161**



- 3.1. Deskripsi Objek Penelitian – 161
  - 3.1.1. MTs Yabika Kabupaten Tangerang – 159
  - 3.1.2. MTs Misbahussudur Kabupaten Serang – 168

## **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN – 179**

- 4.1. Temuan – 179
  - 4.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Inklusi – 179
- 4.2. Pembahasan – 215
  - 4.2.1. Pelaksanaan Belajar Madrasah Inklusi – 219
  - 4.2.2. Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Inklusi – 221
  - 4.2.3. Pencapaian Kurikulum Madrasah Inklusi – 227
  - 4.2.4. Hambatan Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Inklusi – 230

## **BAB V KESIMPULAN – 232**

- 5.1. Kesimpulan – 232
- 5.2. Saran – 232

DAFTAR PUSTAKA - 233

LAMPIRAN - 243

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Banten - 244

Tabel 2: Jumlah Sekolah Inklusi di Provinsi Banten - 245

Tabel 3: Jumlah Madrasah Inklusi di Provinsi Banten - 246

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Rancangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Inklusi - 148

Gambar 2.2: Program Pembelajaran Individual (PPI) - 150

Gambar 2.3: Prosedur Pembelajaran Siswa dalam Seting Inklusi - 152

Gambar 2.4: Kerangka Konseptual Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum - 159

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Observasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan, dengan ahlak mulia yang berdampak *rahmatan lil alamin*.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

---

<sup>1</sup> Suderajat, Hari. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBNS)*. Bandung: PT. Cipta Cekas Grafika, 2005, hal. 6

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan undang-undang di atas, bahwa fungsi pendidikan nasional hakikatnya untuk membantu mengembangkan potensi diri manusia menjadi dirinyai sendiri, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi warga Negara yang bertanggung jawab yang memiliki kompetensi atau berkemampuan yang terintegrasi iman, ilmu dan amalnya; yang tergambar dalam perilaku akhlak mulia. Adapun fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.<sup>2</sup>

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan manusia; mengembangkan potensi kecakapan, dan kepribadian, memberikan pengetahuan

---

<sup>2</sup> Mulyasana Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal.5

dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, lanjutan studi maupun bekerja. Mencakup semua aspek perkembangan baik intelektual, sosial, afektif atau sikap, nilai dan moral, maupun fisik dan ketrampilan. Upaya atau layanan pendidikan diberikan dalam bentuk bimbingan (mendidik), pembelajaran, dan latihan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al'Araaf, ayat 179.<sup>3</sup>

“Sesungguhnya Kami ciptakan untuk (isi neraka) kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), mempunyai telinga tidak dipergunakan mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, Mereka itulah orang-orang yang lalai”.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2005



Mereka yang tidak mau belajar, yaitu menggunakan semua kemampuan dirinya (panca indra, pikiran, hati dst) untuk mempelajari, mengkaji kebesaran Allah termasuk ilmu Allah, ancamannya adalah neraka. Sebaliknya orang-orang yang banyak belajar mengkaji dan mendalami ilmu Allah, balasannya adalah surga, seperti sabda Rasulullah, Saw: "*Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga*" ( HR Muslim).<sup>4</sup>

Menyikapi hal ini, pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan melalui berbagai cara, antara lain dengan menyempurnakan kurikulum berkaitan dengan pendidikan dan lain-lainnya. Sehingga hakikat pendidikan tersebut, perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara maksimal terintegrasi dan holistik oleh penyelenggara pendidikan.

---

<sup>4</sup> An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 5*, Penerjemah Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hal.139

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dikenal tiga jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal dan lingkungan pendidikan non formal. Ketiga penyelenggaraan pendidikan itu dijalani secara individu berlangsung terus menerus sepanjang hayat. Fungsi pendidikan yaitu pengembangan dan kemampuan guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat perlu diwujudkan dalam suatu indikator yang diharapkan mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan mengembangkan siswa potensial menjadi manusia beriman dan bertaqwa, sehat, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk itu perlu adanya kerjasama stakeholder pendidikan terutama pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Instrumen kebijakan keberadaan pemerintah kepedulian pemerintah atas komunitas berkebutuhan khusus diantaranya undang-undang 19/2011 menjelaskan konvensi hak-hak penyandang disabilitas,

kemudian peraturan Menteri Agama 90/2013 yang mengatur tentang pendidikan madrasah serta peraturan Gubernur Banten 70/2014 yang menguraikan panduan pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Hal tersebut menjadi pijakan penting bagi terwujudnya terobosan dalam pelayanan pendidikan terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan madrasah inklusi di provinsi Banten.

Pendidikan inklusi di Indonesia mulai dirintis sejak tahun 2003, walaupun penerapannya terkendala dengan kurikulum, keterbatasan kompetensi guru berbasis anak berkebutuhan khusus, kesulitan penilaian, kebijakan, manajerial, pendanaan dan sarana prasarana.<sup>567</sup> Secara konseptual, dengan diterapkannya

---

<sup>5</sup> Hermanto. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah*. Jurnal Pendidikan Khusus, Volume 6 Nomor 1, September 2010, pp 65-82.

<sup>6</sup> Syamsul Huda Rohmadi. *Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah (Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam)*. In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 - 8 November 2012, Surabaya - Indonesia

<sup>7</sup> Zumrotul Mukaffa. *Pengembangan Model Madrasah Inklusi (Studi Atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusi*

pendidikan inklusi memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) bersekolah di sekolah manapun sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kenyataannya belum banyak sekolah di Indonesia yang siap menerima ABK dengan berbagai alasan baik alasan teknis maupun nonteknis. Tidak ada peralatan khusus, guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar ABK, hadirnya ABK dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan sebagainya sering menjadi alasan untuk tidak menerima ABK.

Dengan demikian sekolah atau madrasah agar dapat siap menerima ABK perlu kesadaran bersama, betapa penting pendidikan bagi setiap orang. Dengan dukungan aturan peundang undang serta ketentuan yang jelas termasuk pengadaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana dan lain sebagainya. Juga perlu sekolah ABK. Inti pelaksanaan kurikulum siswa ABK yaitu selain kemandirian untuk hidup juga siswa memiliki

ketrampilan yang dibutuhkannya. Mutu pendidikan sekolah atau madrasah, tidak terkecuali kelas inklusi atau bukan dalam perbedaan yang dimiliki siswa kelainan dalam kecerdasan sehingga seluruhnya memiliki kecerdasan dan kesempatan yang sama dalam optimalisasi potensi diri mereka yang dasarnya tidak dapat dipisahkan oleh komunitasnya. Kondisi tersebut bisa dihadapi oleh semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, untuk itu perencanaan pembelajaran ABK belum terlaksana secara maksimal dan masih beberapa kegiatan yang tidak dilakukan dengan baik oleh guru dan GPK terutama identifikasi, asesmen, dan modifikasi kurikulum.<sup>8</sup>

Pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan

---

<sup>8</sup> Aslina Roza<sup>1</sup> dan Rifma *Perencanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Manajemen Sekolah Inklusi*. (JKPD) Jurnal Kajian Pendidikan Dasar Volume 5 Nomor 1, Januari 2020, pp. 61-69

anak. Di samping itu, pendidikan inklusi didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Pendidikan inklusi dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia. Beragamnya karakter dan tipologi setiap anak peserta didik, memasikan setiap sekolah mampu menyediakan keterampilan akademis dan non akademis yang menjadikan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>9</sup> Untuk itu pentingnya kurikulum inklusi bukan hanya pada penyesuaian kompetensi dasar tetapi juga pada metode pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sehingga

---

<sup>9</sup> Kadir, Abd. *Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3 Nomor 1, Juni 2015, pp.1-22

kurikulum yang dilaksanakan telah difahami baik oleh pimpinan sekolah, guru dan orang tua siswa.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang setara termasuk didalamnya jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan sifat fisik dan mental alaminya. Dalam Islam, menjelaskan bahwa pendidikan menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menimbanya bagi setiap muslim atau manusia, sebagaimana yang dinyatakan melalui hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Bukhari, dimana menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim.<sup>11</sup> Kemudian Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dengan memberinya penghargaan kepada orang yang menuntut ilmu atau berilmu sebagaimana dalam

---

<sup>10</sup> Melda Fajra, Nizwardi Jalinus, Jalius Jama dan Oskah Dakhi. *Pengembangan Model Kurikulum Sekolah Inklusi Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan Anak Didik*. Jurnal Pendidikan, Volume 21 Nomor 1, Januari 2020, pp.51-63

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*.

surat Al-Mujadalah ayat 11, dimana Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pendidikan inklusi akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya di Banten telah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan baik berbentuk pondok pesantren (salafi dan modern) dan sekolah umum-keagamaan (MI, MTs, MA) bahkan pada perguruan tinggi termasuk didalamnya. Hal ini harus disadari oleh semua pihak bahwa membangun generasi muda dengan integritas keagamaan sangat kuat di Banten termasuk bagi anak atau siswa yang berkebutuhan khusus.

---

<sup>12</sup> Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal, 2010, hal.67



Pada tahun 2015 terdapat 5558 anak berkebutuhan khusus di provinsi Banten<sup>13</sup>, namun pada tahun 2016 dari total anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusi hanya 896 siswa yang tersebar di sekolah inklusi.<sup>14</sup> Hal ini menjadi keprihatinan bagi kita, lalu kemanakah anak berkebutuhan khusus tersebut bersekolah, apakah bergabung dengan sekolah atau madrasah reguler, mengikuti pendidikan informal berupa kursus atau latihan kerja, mengikuti pendidikan non formal berupa pendidikan penyetaraan yaitu paket A, B dan C, atau mungkin saja terlantar dan sebagainya.

Tujuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten dengan Studi Pada Sekolah Inklusi di Kota Serang belum tercapai.

---

<sup>13</sup> Direktur Jenderal Pendidikan Islam. *Surat Keputusan Penetapan 22 Madrasah Inklusi*. Jakarta: Kemenag RI, 2016.

<sup>14</sup> Badan Penyelenggara Pendidikan Khusus Provinsi Banten. *Laporan Pendidikan Inklusi Provinsi Banten 2016*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2016

Kekurangan tenaga pendidik atau guru pembimbing khusus (GPK) dan juga kurangnya pelatihan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik khusus menjadi masalah di lingkungan sekolah dengan pendidikan inklusi di Kota Serang. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan khusus juga masih menjadi masalah klasik yang ternyata belum bisa teratasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Serang.<sup>15</sup>

Penerimaan ABK baru tidak melalui proses asesmen dan identifikasi sesuai standar tetapi hanya menggunakan tes dan wawancara dengan orang tua siswa; banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan untuk penanganan ABK. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari pengawas dan Kemenag juga tidak ada.

---

<sup>15</sup> Titi Stiawati, Listyaningsih dan, Syarifah Rahmi Aziizi. *Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten (Studi Pada Sekolah Inklusi di Kota Serang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, [Volume 8 Nomor 1, Juli 2017](#), pp.1-10

Demikian juga kerjasama dengan pihak eksternal juga belum banyak dilakukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan data di atas, masih banyak siswa berkebutuhan khusus akan memberikan ruang bagi lembaga pendidikan Islam mengambil peranan tersebut, sebab nilai dakwah yang di emban sama dengan siswa yang normal; Artinya kepedulian lembaga pendidikan Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan atau kelas inklusi sangat dibutuhkan, Siswa berkebutuhan khusus tersebut juga harus menimba ilmu agama yang lebih baik sekedar ilmu umum dan jenis keterampilan. Untuk itu madrasah penting hadir membantu keberadaan mereka sebagai tanggungjawab bersama, dimana sejak tahun 2016 terdapat empat madrasah yang menyelenggarakan madrasah inklusi di Banten yaitu MI Al Hamdaniah Kabupaten Tangerang, MTs Misbahussudur Kabupaten

---

<sup>16</sup> Sumarni. *Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Madrasah*. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 17 Nomor 2, Juni 2019, pp.148-161

Serang, MTs Riyadul Jannah Kabupaten Tangerang dan MTs Yabika Kabupaten Tangerang.<sup>17</sup>

Pada tahun 2015 di MI Alhamdaniyah Kabupaten Serang, MTs Misbahussudur Kabupaten Serang dan MTs Yabika Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kurikulum pendidikan inklusi dengan model duplikasi, dengan jumlah masing-masing siswa 170, 29 dan 269 siswa berkebutuhan khusus. Untuk itu dalam rangka menjaga standar penyelenggaraan madrasah inklusi yang diterapkan, melalui anak yang memiliki kebutuhan khusus terdapat di empat madrasah inklusi di Banten menjadi penting adanya dilakukan pengkajian ulang terhadap efektivitas kurikulum yang diterapkan sehingga dapat memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat luas.

Dari hal tersebut sangat menarik untuk diteliti evaluasi pelaksanaan kurikulum madrasah inklusi di Provinsi Banten

---

<sup>17</sup> Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *op.cit*

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian evaluasi pelaksanaan kurikulum madrasah inklusi di Provinsi Banten ditinjau dari aspek:

- a. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kurikulum di madrasah inklusi?
- b. Bagaimana pencapaian program kurikulum madrasah inklusi?
- c. Bagaimana daya dukung terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi?
- d. Bagaimana hambatan terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi?

## **1.3. Batasan Masalah**

Fokus masalah penelitian ini yaitu “Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Inklusi di Provinsi Banten” dimana dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum madrasah inklusi dengan memasukan pertimbangan antara lain formalistik pelaksanaan, hasil analisis kebutuhan program, peran kepemimpinan kepala madrasah, kondisi sarana prasarana, siapnya guru

melakukan evaluasi, siswa beraktivitas, hasil pelaksanaan program dan hasil pencapaian kurikulum madrasah inklusi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kurikulum dari madrasah yang akan di teliti.

Penelitian ini mendapat batasan dalam mencari berbagai informasi yang meliputi:

- a. Karena adanya pandemi Covid-19 ini yang membatasi ruang gerak sehingga pendekatan yang dilakukan adalah observasi dan wawancara.
- b. Data kepemimpinan kepala madrasah, kesiapan guru dan orang tua didapat dari hasil wawancara.
- c. Data kesiapan guru dalam proses pembelajaran didapatkan dari potofolio laporan atau penyusunan rencana program pengajaran (RPP) modifikasi yang disahkan oleh kepala mandrasah melalui wawancara.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian evaluasi pelaksanaan kurikulum madrasah inklusi di Provinsi Banten ditinjau dari:

- a. Mengetahui pelaksanaan kurikulum inklusi di madrasah.
- b. Mengetahui pencapaian program kurikulum madrasah inklusi.
- c. Mengetahui daya dukung terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi.
- d. Mengetahui hambatan terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Teoretis  
Hasil studi dapat menambah referensi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.
- b. Praktis
  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta menyiapkan pendidikan inklusif, bahwa segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus sudah terpenuhi saat menunjuk sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Pemerintah Provinsi Banten

Dapat menjadi informasi peran madrasah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi serta meningkatkan daya dukung pemerintah dalam memfasilitasinya

3. Sekolah

Studi ini dapat memberikan masukan mengenai persiapan yang harus dilakukan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

4. Orang Tua Siswa



Dapat menambah pengetahuan orang tua siswa tentang maksud dan tujuan sekolah inklusif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendidikan Inklusi**

##### **2.1.1. Pengertian Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk pemenuhan hak azasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.

Pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Di samping itu, pendidikan inklusi didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang

menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, pendidikan inklusi dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia .

Pendidikan inklusi dalam konteks yang lebih luas, dapat dimaknai sebagai *education for all*, merupakan bentuk reformasi dalam dunia pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Pada umumnya sistem Pembelajaran pendidikan inklusi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah menengah menerapkan pendekatan model inklusi (*full inclusive*), dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya

dalam kelas yang sama. Kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum modifikasi, yang merupakan hasil dari penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi khusus yang dimilikinya.

Secara konseptual, dengan diterapkannya pendidikan inklusi memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) bersekolah di sekolah manapun sesuai dengan keinginannya. walau kenyataannya belum banyak sekolah di Indonesia yang siap menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan berbagai alasan baik alasan teknis maupun nonteknis. Tidak ada peralatan khusus, guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK), hadirnya anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan

sebagainya sering menjadi alasan untuk tidak menerima anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan inklusi hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

#### 1. Sekolah Segregasi

Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka

sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

## 2. Sekolah terpadu

Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain

pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

### 3. Sekolah inklusi

Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang

menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Melalui peraturan di atas maka Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan



program dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pasal 6 yang menyatakan bahwa; 1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik; 2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan inklusif; 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Beberapa dokumen internasional yang penting dan mendasari pendidikan inklusi yang telah disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia antara lain, deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948, konvensi PBB tentang hak anak tahun 1989, deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua tahun 1990, peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat tahun 1993, pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus tahun 1994, kerangka aksi forum pendidikan dunia tahun 2000 dan yang lainnya.

Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusi juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah, keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.

Di buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif dikeluarkan Direktorat PLB, tahun 2007 , menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan,

Satuan pendidikan ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan inklusif adalah sekolah yang

menampung semua peserta didik baik yang normal maupun berkelainan di lingkungan sekolah dan kelas yang sama. Sekolah inklusi menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.

Pendidikan inklusif yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (*education for all*) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, yaitu Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan

kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak berkebutuhan khusus.

### **2.1.2. Pengelompokan Pendidikan Inklusi**

Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sesuai dengan jenis hambatan yang dialami. Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### **1. Hambatan Penglihatan**

Hambatan penglihatan yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatan (tunarungu) sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Klasifikasi gangguan penglihatan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan dan dalam perspektif pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kelompok low vision dan totally blind. Low vision adalah kelompok hambatan penglihatan yang masih mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (acuity), kelompok ini

---

<sup>18</sup> Sunanto, J., dan Hidayat, H. *Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusi*. Jassi Anakku, Volume 17 Nomor 1, Mei 2017, pp.47-55.

mampu melihat dari jarak 6 meter, jauh lebih dekat dibandingkan dengan penglihatan orang normal (21 meter). Gambaran umum dari kelompok ini, mereka masih mampu mengenal bentuk objek dari berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak. Totally blind adalah kelompok yang memiliki hambatan penglihatan secara total yang tidak bisa memfungsikan kemampuan visualnya dan tidak bisa merasakan adanya sinar, baik waktu siang maupun malam hari. Akibat hambatan ini, maka mereka diajarkan untuk memahami kemampuan membaca dan menulis braille dan orientasi mobiltas untuk membantu dalam menjalankan daily activities.

## 2. Hambatan pendengaran

Tunarungu merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah hearing impairment, istilah ini menggambarkan adanya kerusakan atau gangguan secara fisik. Akibat kerusakan tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi pendengaran. Anak mengalami

kesulitan untuk memperoleh dan mengolah informasi yang bersifat auditif, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan interaksi dan komunikasi secara verbal.

Menurut Firdaus bagi anak dengan hambatan pendengaran congenital atau berat, suara yang keras tidak dapat didengarnya meskipun dengan menggunakan alat bantu dengar. Individu tersebut tidak dapat menerima informasi melalui suara, tetapi mereka sebaiknya belajar bahasa bibir.<sup>19</sup> Suara yang dikeluarkan oleh anak dengan hambatan pendengaran biasanya sering sulit untuk dimengerti karena mereka mengalami kesulitan dalam membedakan artikulasi, kualitas suara, dan tekanan suara.

### 3. Hambatan Intelektual.

Anak yang mengalami hambatan intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan

---

<sup>19</sup> Firdaus, E. *Pendidikan Inklusi dan Implementasinya di Indonesia*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Pendidikan Di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, 24 Januari 2010

keterbelakangan perkembangan mental-intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami hambatan intelektual ialah anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Anak dengan hambatan intelektual biasa disebut dengan tunagrahita. Berdasarkan berat ringannya ketunaan, maka mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Hambatan intelektual ringan

Umumnya mereka memiliki kondisi fisik yang tidak berbeda. Mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70 dan juga termasuk kelompok mampu didik, masih bisa diajar membaca, menulis dan berhitung.

b. Hambatan intelektual sedang

Mereka termasuk kelompok latih. Kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak mengalami hambatan intelektual yang



mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50.

c. Hambatan intelektual berat

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya. Tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

Anak yang mengalami hambatan intelektual memiliki tiga indikator, yaitu: Keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan Hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun.

4. Gangguan Gerak,

Gangguan gerak adalah: tingkat kecacatan fisiknya mengakibatkan mereka mengalami kesulitan yang berat atau ketidakmungkinan melakukan gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan

menulis meskipun dengan menggunakan alat-alat bantu pendukung. Tingkat kecacatan fisiknya tidak lebih dari huruf (a) di atas namun harus tetap mendapat bantuan dan alat pendukung lainnya.

#### 5. Gangguan Perilaku dan Emosi.

Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (*behavior disorder*) adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat dan sangat berat. Kelainan tingkah laku ditetapkan bila mengandung unsur: Tingkah laku anak menyimpang dari standar yang diterima umum. Derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim. Lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan.

#### 6. Anak autis

Anak autis merupakan kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial. Secara umum karakteristik anak autis adalah sebagai berikut: mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam

mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati, sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku, kurang memahami keberadaan dirinya, dan keterbatasan dalam mengekspresikan diri.

Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Di dunia pendidikan anak autisme terbagi tiga macam, yaitu:

- a. Memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat tinggi;
- b. Memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat menengah;
- c. Memiliki fungsi kognisi dan intelektual tingkat rendah.

#### 7. Anak cerdas berbakat istimewa

Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa (*gifted*) dan anak yang memiliki bakat istimewa (*talented*) adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan

(*intelegensi*) kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas task (*commitment*) di atas kemampuan anak-anak seusianya (anak normal) di atas kemampuan anak-anak seusianya ( anak normal), sehingga untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan pelayanan Pendidikan Khusus. Anak cerdas dan berbakat istimewa disebut sebagai *gifted and talented children*.

Ciri-ciri Anak cerdas istimewa berbakat istimewa, antara lain:

- a. Menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, yang tidak lazim dan pikiran-pikiran yang kreatif
- b. Mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang utuh; Menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi;
- c. Memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah;
- d. Memiliki daya ingat jangka panjang yang kuat;

- e. Memiliki kemampuan membaca yang sangat cepat;
- f. Menginspirasi orang lain;
- g. Sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan;
- h. Mempunyai daya imajinasi yang luar biasa.

#### 8. Anak Kesulitan Belajar

Secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya dan berdampak pada hasil akademiknya. Kesulitan belajar merupakan hambatan atau gangguan belajar pada anak atau remaja yang ditandai adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelegensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai oleh anak seusianya.

#### 9. Anak Jalanan

Anak jalanan membutuhkan pendidikan khusus, terutama pendidikan karakter. Banyak hal yang membuat mereka menjadi anak jalanan. Yang pasti,

mereka menjadi anak yang besar dan akrab dengan jalan.

#### 10. Anak *Broken Home*.

Faktor yang mempengaruhi siswa broken home selain dari faktor luar seperti lingkungan sosial, juga faktor yang paling utama yang sangat berpengaruh yaitu penyesuaian diri yang bersumber dari pribadi individualnya. Faktor-faktor di atas dapat menjadi kendala dan penghambat prestasinya dalam proses pendidikan.

### 2.2. Kebijakan Pendidikan Inklusi

Pertama kali suatu kebijakan pendidikan yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan (*goal*) yang jelas sebagaimana diinginkan. Kedua, tujuan yang diinginkan itu harus pula direncanakan (*plans*) atau harus ada proposal secara matang, yakni pengertian yang spesifik dan operasional untuk mencapai tujuan. Ketiga, harus ada (*program*), yaitu upaya dan cara-cara dari yang berwenang untuk mencapai tujuan. Keempat adalah

(*decision*), yaitu segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah (*effect*), yaitu akibat-akibat dari program yang akan dijalankan baik yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja, baik yang primer maupun sekunder.

Secara khusus salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Melalui peraturan di atas maka Kemendiknas Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan program dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pasal 6 yang menyatakan bahwa; 1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik; 2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya

sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan inklusif; 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan secara sederhana sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.10 tahun 2011 menjelaskan bahwa ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan fisik,mental,intelektual,sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain sesusianya.Jadi yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah seorang anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada



ketidakmampuan mental, emosi dan fisiknya. Mereka memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing mereka secara personal.

Pentingnya pendidikan inklusi dalam konteks yang lebih luas, dapat dimaknai sebagai *education for all*, merupakan bentuk reformasi dalam dunia pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Tertulis di Undang Undang Sitem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pasal 15 bahwa jenis pendidikan inklusi bagi ABK adalah Pendidikan Khusus. Sedangkan pada pasal 32 (1) memberikan batasan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia, Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: 1) tunanetra, 2) tunarungu, 3) tunawicara, 4) tunagrahita, 5) tunadaksa, 6) tunalaras, 7) berkesulitan belajar, 8) lamban belajar, 9) autisme, 10) memiliki gangguan motorik, 11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif, dan 12) memiliki kelainan lain.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki

perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan yang dialami oleh setiap anak menurut Alimin disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 1) lingkungan, 2) dalam diri anak itu sendiri, dan 3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.<sup>20</sup> Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 15 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi ABK adalah Pendidikan Khusus. Sedangkan pada pasal 32 (1) memberikan batasan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Kemudian adapun tujuan pendidikan inklusi berdasarkan peraturan mendiknas nomor 70 tahun 2009 menyebutkan yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki

---

<sup>20</sup> Alimin, Z. *Anak Berkebutuhan Khusus*, PKKH UPI: Bandung, 2008, hal.104

kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serata mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: 1) tunanetra, 2) tunarungu, 3) tunawicara, 4) tunagrahita, 5) tunadaksa, 6) tunalaras, 7) berkesulitan belajar, 8) lamban belajar,

9) autis, 10) memiliki gangguan motorik, 11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif, dan 12) memiliki kelainan lainnya.

Untuk lingkup Kementerian Agama, telah keluar juga regulasi yang mengatur masalah pendidikan inklusi, yaitu: SK Dirjen Pendidikan Islam No. 3211 tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusi dan SK Ditjen Pendidikan Islam No. 2768 tahun 2019 tentang Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di RA.

Negara menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusi pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah. Secara tegas dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh negara. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam

perspektif hak asasi manusia. Provinsi Banten tidak surut dalam kewajibannya berpartisipasi memberikan pelayanan penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa mengharuskan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit satu sekolah tingkat dasar dan satu sekolah tingkat menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menjalankan pendidikan inklusi. Dalam permendiknas tersebut juga dijelaskan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya.

Guru tidak hanya mengajar siswa normal pada umumnya, melainkan siswa-siswa yang juga memiliki keterbatasan, sehingga perlu adanya penanganan khusus dalam memberikannya pelajaran. Sehingga, dibutuhkan guru pendidikan khusus yang dapat memahami siswa berkebutuhan khusus dengan komunikasi instruksional sehingga autisme dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus menjelaskan bahwa Guru pendidikan khusus adalah tenaga profesional. Guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.

Media pembelajaran yang digunakan guru pembimbing khusus (GPK) juga dibuat sendiri dari dana sisa operasional sekolah dan dibuat apa adanya. Padahal, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten telah diatur tentang hak peserta didik seperti pada pasal 9 huruf b dan c yang berbunyi bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan dan kebutuhan khususnya. Peserta didik berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya sesuai

Guru pendidikan khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa.<sup>21</sup> Menurut kebijakan pendidikan

---

<sup>21</sup>Devi Kurnia Khikmawati, Tina Indri Astuti, dan Any Novitasari. *Penerapan E-Learning Pada Sekolah Luar Biasa (SLB)*. Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan



nasional bahwa kompetensi guru pendidikan khusus dilandasi oleh tiga kompetensi utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*), (2) kemampuan dasar (*basic ability*), (3) kemampuan khusus (*specific ability*). Berkenaan dengan hal tersebut, guru pendidikan khusus diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kemampuan umum (*general ability*)
  - 1) Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian.
  - 2) Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga negara.
  - 3) Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa.

---

Sastra Indonesia, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2020, pp. 32-43

<sup>22</sup> Depdiknas. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007

- 4) Memahami konsep dasar kurikulum dan cara mengembangkannya.
  - 5) Memahami disain pembelajaran kelompok dan individual.
  - 6) Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya.
- b. Kemampuan dasar (*basic ability*)
- 1) Memahami dan mampu mengidentifikasi anak luar biasa.
  - 2) Memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen, serta melakukan asesmen anak berkelainan.
  - 3) Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak berkelainan.
  - 4) Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkelainan.

- 5) Mampu melaksanakan manajemen ke-PLBan.
- 6) Mampu mengembangkan kurikulum PLB sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkelainan serta dinamika masyarakat.
- 7) Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan PLB.
- 8) Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan PLB.
- 9) Mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang ke-PLB-an.
- 10) Memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkelainan.
- 11) Memiliki sikap profesional di bidang ke-PLB
- 12) Mampu merancang dan melaks anakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat.

13) Mampu merancang program advokasi.

c. Kemampuan khusus (*specific ability*)

Kemampuan khusus merupakan keahlian yang dipilih sesuai dengan minat masing-masing tenaga kependidikan. Pada umumnya masing-masing guru memiliki satu kemampuan khusus (*specific ability*). Kemampuan tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Mampu melakukan modifikasi perilaku.
- 2) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/ kelainan penglihatan.
- 3) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi.
- 4) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/ kelainan intelektual.

- 5) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan / kelainan anggota tubuh dan gerakan.
- 6) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/ kelainan perilaku dan sosial.
- 7) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal). Sedangkan kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik luar biasa (anak berkelainan). Kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk

mendidik peserta didik luar biasa jenis tertentu (spesialis).<sup>23</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut di sekolah, guru pendidikan khusus memiliki peran penting dalam menggantikan peran orangtua di rumah dalam membentuk karakter siswa autis murni bahkan dalam membangun perkembangan, sehingga dapat menghadapi kehidupan kedepannya tanpa tergantung kepada orang lain. Dalam pelaksanaan pembelajaran terjadi proses komunikasi dimana interaksi antara siswa autis murni sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, merupakan mata rantai yang menghubungkan antara guru dan siswa autis murni sehingga terbina komunikasi yang memiliki tujuan yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Di dalam komunikasi instruksional, seorang guru harus menciptakan iklim yang komunikatif dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang lebih intens terhadap

---

<sup>23</sup> Kasirah, I. *Kompetensi Pedagogis Guru PLB Dalam Meningkatkan prestasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus*. Perspektif Ilmu Pendidikan, 24, Juli 2011, pp. 163-173

siswa autis murni yang membuatnya tertarik dan mengamati pada pelaksanaan pembelajaran dan menirunya. gurupun memberikan apresiasi kepada siswa autis murni dianggap bisa menumbuhkan semangat dan meningkatkan perkembangan bagi siswa autis murni pada pelaksanaan pembelajaran.

### **2.3. Siswa Berkebutuhan Khusus**

Siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan khusus baik kelainan fisik, mental maupun perilaku sosial sehingga memiliki kesulitan atau ketidakmampuan sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus, dengan adanya guru yang berusaha melakukan interaksi psikologis sehingga dapat mengembangkan potensi, bakat dan pengetahuan serta menjadi lebih mandiri dan percaya diri.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tumbuh dan kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial-emosional, dan komunikasi yang berbeda dengan

anak ada umumnya atau normal sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus.<sup>24</sup> Sedangkan anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang tidak akan berhasil disekolah anak-anak pada umumnya atau sekolah umum.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Menegaskan bahwa negara memberikan jaminan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan kesempatan sama dengan anak lainnya dalam bidang pendidikan.

Secara garis besar anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau

---

<sup>24</sup> Sulthon. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kencana, 2020, hal. 78

<sup>25</sup> Atmaja, J. R. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Rosda, 2018, hal.92



permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer. Anak berkebutuhan khusus yang menetap terdiri dari: tunanetra (gangguan pengelihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunagrahita (gangguan keterbelakangan mental), tunadaksa (mengalami kelainan atau cacat pada alat gerak), ketunalarasan (kesulitan dalam menyesuaikan diri), kesulitan belajar, ADHD (anak dengan kelainan kurang perhatian dan hiperaktifitas), kelainan bicara atau bahasa, autisme, anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan dengan anak berkebutuhan bersifat sementara (*temporer*) yaitu: anak-anak yang berada di daerah terpencil, anak-anak yang berada pada masyarakat suku minoritas/terasing, anak-anak yang berada pada masyarakat miskin (kurang beruntung), mengalami bencana alam, mengalami bencana sosial/korban perang/kerusuhan, anak-anak

yang berada pada kelompok masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian tentang siswa berkebutuhan khusus dapat disimpulkan berbeda dengan siswa normal, mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Sehingga diakibatkan ketergantungan kepada orang lain yang begitu besar. Siswa berkebutuhan khusus yang berkembang tidaklah muncul begitu saja secara mendadak tetapi harus dengan latihan memerlukan pendampingan extra dari orang-orang sekitar dalam melewati tahapan-tahapan tersebut untuk membentuk dan berkembang pada pelaksanaan pembelajaran. Salah satu penanganan masalah perkembangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui pemberian layanan pendidikan yang tepat bagi siswa

---

<sup>26</sup> Haenudin. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu*, Jakarta: Luxima, 2013, hal.102

berkebutuhan khusus terutama autis murni, sehingga guru disekolah khusus pandita berkomunikasi dengan sistem intruksional dengan proses hubungan dapat mempunyai efek dalam perkembangan siswa berkebutuhan khusus pada pelaksanaan pembelajaran.

#### **2.4. Kurikulum**

Salah satu pilar menjadikan dunia pendidikan berkembang lebih sistematis dan dinamis, adalah instrumen kurikulum dimana dapat dikatakan sebagai kurikulum yang dipelajari setiap individu dalam suatu program pendidikan sesuai dengan teori dan praktek yang diperolehnya. Hal ini yang memberi indikasi bahwa setiap kurikulum menjadi sistem pembelajaran yang terstruktur baik dalam konsepsi maupun implementasi sehingga menghasilkan produk hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa sebagai penggunanya.

Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak terbatas dalam ruang saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tidak adanya

pemisahan yang tegas antar program intra dan ekstra kurikulum sehingga semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan pada hakikatnya bagi siswa adalah kurikulum. Di dalamnya sebaiknya ada pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik, yang berada di dalam kelas akan menghasilkan pembelajaran yang baik dan efektif sehingga akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa serta mendukung hasil belajar yang lebih baik.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu pokok dalam upaya memajukan generasi sehingga sudah sepatutnya dalam pembukaan undang-undang dasar sembilan belas empat lima, termaktub dengan tegas menyebutkan: pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia dan wajib mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu menjami kesempatan pendidikan di seluruh lapisan dan wilayah Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan.

Tenaga pendidik atau guru saat ini dapat sebagai pengembang kurikulum, dimana memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum, dimana guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan dan sistem evaluasi apa yang akan digunakannya menurut Lubis sebagai pengembang kurikulum guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi madrasah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang diperlukan anak didik.<sup>27</sup>

Dengan demikian kurikulum dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pentingnya kemampuan guru yang baik dalam menyusun tujuan, isi, strategi dan evaluasi dalam yuridiksi kurikulum yaitu seperangkat pengelolaan tentang tujuan, isi dan proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Sebagaimana tujuan

---

<sup>27</sup> Lubis, M. 2016. *Kesiapan Para Guru sebagai Pengembang Kurikulum dalam Merespon Perubahan Kurikulum*. International Management Conference 2016 Proceedings 1(1), Juli 2016, 461-466.

kurikulum madrasah inklusi yang adaptif agar sumberdaya manusia Indonesia mampu berkontribusi kepada negara dan bangsa.

Pendidikan memiliki tujuan yang akan dicapai secara keseluruhan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar disertai dengan penguasaannya yang dimilikinya secara bertahap, berkelanjutan dan melengkapi sampai memberikan efek secara keseluruhan. Dalam hal tersebut, dimana kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Adaptasi nilai sosial yang kurang relevan dengan saat ini perlu diadakan modifikasi atau penyempurnaan sehingga kurikulum memiliki peranan yang seimbang dan harmonis agar dapat beradaptasi dengan keadaan. Namun jika sebaliknya jika tidak dilaksanakan akan menciptakan ruang ketimpangan yang menjadikan fungsi kurikulum pendidikan tidak atau kurang optimal.

Selanjutnya bagaimana tujuan dari kurikulum madrasah inklusi dapat tercapai sesuai yang diharapkan, untuk isu sebagai langkah meningkatkan kualitas

pendidikan dituntut antara keseimbangan *hard skills* dan *soft skills* melalui kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki yang menjadi tantangan dalam persaingan global. Pembelajaran yang terpadu atau terintegrasi menjadi sebuah fenomena yang menggabungkan fakta yang dilapangan dengan cara memahami proses yang terjadi sehingga menghasilkan proses befikir alamiah dan dapat memberikan pernyataan atau hasil yang obyektif.

Konsep kurikulum terdiri atas kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.<sup>28</sup> Yang dimaksud kurikulum sebagai substansi, artinya kurikulum merupakan suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai, sebagai hasil dokumen tertulis hal persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum, pemegang kebijaksanaan dengan masyarakat; baik lingkup satu sekolah, kabupaten,

---

<sup>28</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum, Praktek dan Teori*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal.149

propinsi atau pun negara. Kurikulum sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Dan kurikulum sebagai bidang studi yaitu, bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum.

Kurikulum yang dirancang kepada rencana mata pelajaran (*subyek matter*) untuk anak didik; disebut *subject centered curriculum*, guru menjadi pusat segalanya. Kurikulum ini yang menjadi perhatian yaitu aspek intelektual anak saja, yang harus dikuasai siswa adalah berupa pengetahuan dan mengabaikan aspek-aspek lain; seperti perkembangan jiwa anak, kebutuhan-kebutuhan pengalaman belajar anak terbatas untuk diekspresikan, Anak dijadikan objek statis, dan isi mata pelajaran terdiri dari sejumlah ilmu pengetahuan sangat padat.

Kurikulum menurut pandangan di atas membagi kegiatan belajar kedalam kegiatan kurikulum



(*intra kurikuler*) kegiatan penyertaan kurikulum (*co-curricular*), dan kegiatan di luar kurikulum (*ekstra kurikuler*). Kegiatan belajar terhadap mata pelajaran yang sudah ditentukan adalah sebagai penunjang atau penyertaan dalam mempelajari suatu mata pelajaran tertentu dianggap kegiatan ko-kurrikuler. Kegiatan di luar kurikulum atau secara langsung tidak menunjang atau menyerta suatu mata pelajaran di sebut ekstra kurikuler.

Kebalikan dari kurikulum di atas atau kurikulum yang berpusat kepada guru atau disebut juga *teacher centered curriculum*. Kurikulum ini mengubah pandangan dan kurikulum *subject/teacher centered curriculum* atau kurikulum yang berpusat kepada mata pelajaran menjadi *student centered*, disebut juga *child centered curriculum*. Kurikulum yang berpusat kepada anak didik mengubah pandangan bahwa kegiatan belajar harus lah berpusat kepada kebutuhan anak, dengan memperhatikan minat dan bakat anak; karena anak lah yang menjadi subyek didik. Menurut

pandangan baru ini, kurikulum tidak sekedar mata pelajaran, kurikulum diartikan sebagai sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam kelas, di luar kelas, dalam pergaulan anak-anak dan sebagainya.

Hakekatnya kurikulum disusun untuk dapat menjadi input instrumental yang membantu peserta didik untuk berkembang sebagai individu sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

#### **2.4.1. Pengembangan Kurikulum**

Implementasi pengembangan kurikulum pada proses pembelajaran di sekolah, selain memakai teori psikologi yang berakar pada konstruktivisme individu (*personal constructivism*) dan perspektif sosiologi yang tertumpu pada konstruktivisme sosial (*social constructivism*), para peneliti dan ahli pendidikan saat ini mencoba untuk menggunakan kajian teori pada konstruktivisme individu (*personal constructivism*) dan

perspektif sosiologi yang tertumpu pada konstruktivisme sosial (*social constructivism*), pada peneliti dan ahli pendidikan saat ini mencoba untuk menggunakan kajian teori antropologi (*anthropological perspective*).

Pengaruh latar belakang budaya yang dimiliki siswa terhadap proses pembelajaran ada dua macam. Pertama, pengaruh positif akan muncul jika materi pada pembelajaran di sekolah yang sedang dipelajari selaras dengan pengetahuan (budaya) siswa sehari-hari. Pada keadaan ini proses pembelajaran mendukung cara pandang siswa terhadap alam sekitarnya.

Proses pembelajaran seperti ini disebut dengan proses inkulturasi (*enculturation*). Sebaliknya, yang kedua, proses pembelajaran di kelas menjadi 'pengganggu' ketika materi pelajaran tidak selaras dengan latar belakang budaya yang sudah mengakar pada diri siswa, serta guru berusaha untuk memaksakan kebenaran materi pelajaran (budaya Barat) dengan cara memarginalisasikan pengetahuan (budaya) siswa

sebelumnya. Proses pembelajaran seperti ini disebut asimilasi.<sup>29 30</sup>

Jika proses pembelajaran inkulturasi meningkatkan cara pemahaman siswa, sebaliknya proses asimilasi berpotensi menjadikan siswa untuk mengalami apa yang disebut dengan keterasingan siswa untuk mengalami apa yang disebut dengan keterasingan (alienation) terhadap kebudayaannya sendiri, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ‘gangguan sosial’ dalam kehidupan sehari-hari.

Secara luas, kurikulum dipahami sebagai seluruh pengalaman belajar yang direncanakan/ditawarkan/diarahkan oleh lembaga pendidikan dan bahkan meliputi pengalaman yang tidak direncanakan (*hidden curriculum*), untuk mencapai

---

<sup>29</sup> Cobern, W. W., dan Aikenhead, G. S. *Cultural Aspects of Learning Science*. In B. J. Fraser dan K. G. Tobin (Eds.), *International Handbook of Science Education*: Kluwer Academic Publisher. 1998, pp. 39-52

<sup>30</sup> Aikenhead, G. S., and Jegede, O. J. *Cross-Cultural Science Education: A Cognitive Explanation of a Cultural Phenomenon*. *Journal of Research in Science Teaching*, Volume 36 Nomor 3, 1999, pp. 269-287

serangkaian tujuan (*a structured series of intended learning outcomes*). Dalam prakteknya, kurikulum terbagi menjadi dua jenis: (1) *curriculum document (inner curriculum)*, dan (2) *operative curriculum (functioning, live)*.<sup>31</sup>

Dikawasan manapun, di era kapanpun, kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menntuka performa dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum tersebut menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah/sekolah, daerah, wilayah maupun nasional.

Sedikitnya terdapat 25 model pengembangan kurikulum yang terdiri dari 16 buah model kerangka kerja (*framework*) kurikulum, 5 buah model segmen kurikulum yakni desain system instruksional, dan 3 buah model segmen kurikulum desain system pelatihan, serta 1 buah modal perencanaan program. Menurutnya,

---

<sup>31</sup> Robert, Zais S. *Curriculum, Principles and Foundations*. New York: Harper & Row, Publishers, 1976, pp.240

setiap kali ada permintaan untuk mengembangkan suatu kurikulum senantiasa diawali dengan pertanyaan, model kurikulum apa yang hendak disusun atau dikembangkan? Oleh karena itu, mengenal model-model pengembangan kurikulum sangat diperlukan bagi tenaga kependidikan umumnya dan tenaga pengembang kurikulum pada khususnya.<sup>32</sup>

Terdapat empat faktor yang memberikan landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempatnya memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap komponen kurikulum yang meliputi tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pendidikan dan evaluasi.

Selain keempat landasan pengembangan kurikulum tersebut, sering tambahkan pula landasan organisatoris, pengembangan kurikulum (*curriculum*

---

<sup>32</sup> Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo., 2000, hal.90

*developers*) mengorganisasikan bahan pembelajaran berdasarkan tujuan dan sararannya, juga berdasarkan topic, konsep, logika, kronologi, dan sebagainya.

Landasan pengembangan kurikulum sangat diperlukan agar beberapa komponen kurikulum bisa menjadi system yang saling mendukung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Sukmadinata<sup>33</sup>, dalam pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum, yaitu: relevansi efektifitas. Dijelaskan bahwa prinsip relevansi meliputi: (1) relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik, (2) relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang, (3) relevansi pendidikan dengan dunia kerja, (4) relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Prinsip fleksibilitas meliputi: (1) fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, dan (2) fleksibilitas dalam pendidikan ngembangan program pengajaran. Prinsip Kontinuitas dalam pengembangan

---

<sup>33</sup> Syaodih Sukmadinata, Nana. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hal.46

kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi.<sup>34</sup>

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang

---

<sup>34</sup> Abdullah Idi. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007, hal.97



pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- Peningkatan iman dan takwa
- Peningkatan akhlak mulia
- Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat

peserta didik

- Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- Tuntutan dunia kerja
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni

- Agama
- Dinamika perkembangan global
- Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

#### **2.4.2. Sumber Pengembangan Kurikulum**

Pendidikan dapat mengubah manusia dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan; karena itu pendidikan mempunyai peranan dalam mengubah masyarakat dan memberi corak baru kepada masyarakat dan

kebudayaan. Pendidikan lazim digunakan oleh pemerintah untuk mengubah individu dan masyarakat menurut falsafah dan cita-cita bangsa. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan menunjukkan kepercayaan orang akan pengaruh dan kemampuan pendidikan dalam merubah wawasan dan pengetahuan manusia.

Pengetahuan senantiasa merupakan inti kurikulum, sejak ada sekolah kurikulum merupakan inti formal. Anak-anak dikirim ke sekolah agar mempelajari ilmu dan menguasai warisan umat manusia, yang ditumpuk selama berabad-abad akan terus dikembangkan, selama ada manusia. Untuk itu isi kurikulum yang baik berkenan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tuntutan dan kebutuhan masyarakat senantiasa berkembang dengan cepat, bila tidak diikuti dengan pendidikan, masyarakat akan merasakan ketertinggalannya. Sebab itu mustahil suatu pendidikan akan berhasil jika tidak diikuti dengan pembaharuan atau pengembangan kurikulum. Oleh karena itu pilihan isi kurikulum harus lebih fungsional dan tahan lama sehingga dalam kondisi apa pun masyarakat berubah; hakikat ilmu pengetahuan yang dipelajari anak tetap bisa bertahan.

Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristiknya dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Kehidupan masyarakat dan pendidikan merupakan kesatuan saling mempengaruhi dan menentukan. Pendidikan merupakan bagian kebudayaan masyarakat. Dalam arti yang lebih mendasar, melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ciri dari masyarakat adalah berkembang, perkembangan masyarakat

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan masyarakat akan mempengaruhi pengetahuan, kecakapan, sikap, aspirasi, minat, semangat, kebiasaan bahkan pola-pola kehidupannya.

#### **2.4.3. Landasan Kurikulum**

Batasan Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana (plan) untuk menyediakan perangkat kesempatan belajar bagi siswa yang mengikuti pendidikan. Dari batasan ini terkesan, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak sulit. Apalagi kalau hanyamenghasilkan rencana pengajuan dalam bentuk serangkaian mata pelajaran. Namun, proses pengembangan kurikulum menjadi kompleks sewaktu tuntutan kearah kurikulum yang sesuai, dengan karakteristik pebelajar dan kebutuhan masyarakat masa depan. Sala satu tahapan penting yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum adalah 'need asessment'. Atas pertimbangan kebutuhan inilah, setiap kali

pengembangan kurikulum selalu diawali dengan melakukan kajian teoritis tentang karakteristik pebelajar sebelum dilanjutkan dengan kajian kebijakan masa depan di tingkat pusat, daerah dan sekolah. Kajian ini tentu perlu melibatkan sejumlah ahli dan pengambil keputusan dengan ebragam pandangan.

Di luar peraturan kebijakan pemerintah sebagai pengejawantahan kepentingan pemerintah yang sudah 'given' dengan tidak bias ditawar, sedikitnya ada tiga pilar pertimbangan sewaktu mengembangkan kurikulum yaitu; (1) kebutuhan masyarakat; (2) karakteristik pebelajar, dan (3) lingkup dengan pengetahuan menurut hirarki keilmuan . Tanpa disadari, seringkali, pertimbangan satu dimenangkan sedangkan pertimbangan lainnya dikalahkan sehingga pengembangan kurikulum sering dilatarbelakangi (baca: didominasi) perspektif tertentu. Kepintaran sang tokoh membungkus dan mengkomunikasikan gagasannya sehingga perangkat kurikulum yang diajukan terkesan logis dan relevan dengan tuntutan masa depan. Padahal

setelah diimplementasikan dan kemudian menghasilkan lulusan sering timbul masalah, terutama akibat mengabaikan perspektif kebutuhan masyarakat dan karakteristik pembelajar.

#### **2.4.4. Perubahan Kurikulum**

Penafsiran konsep kurikulum bagi peneliti dan praktisi pendidikan dapat berbeda satu sama lain. Secara umum, konsep kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu spesifik rangkaian pengetahuan, keterampilan dan kegiatan untuk disampaikan kepada siswa. Penafsiran lain, konsep kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kepribadian dan kegiatan yang direncanakan sebagai paduan guru untuk mengajar dan siswa untuk belajar.

Penerapannya, penafsiran ini dapat ditetapkan lebih lanjut dalam tiga level apakah (1) sebagai kurikulum nasional pada level nasional, (2) sebagai kurikulum sekolah pada level sekolah, (3) sebagai kurikulum mata pelajaran pada level mata pelajaran.

Apabila konsep ini dibatasi pada level sekolah, maka kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dan konten pada level individu siswa, level program, atau level sekolah untuk memandu guru melakukan tugas mengajar dan siswa melakukan tugas belajar. Diskusi tentang perubahan kurikulum melalui manajemen berbasis sekolah hanya membahas pada level sekolah.

Untuk memperluas wawasan pemikiran, perubahan dan pengembangan kurikulum bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas mengajar dan belajar melalui perubahan konten yang direncanakan kegiatan dan rencana perbaikan proses pendidikan. Jika cara berpikir ini diterima, diskusi perubahan kurikulum dapat dihubungkan dengan konsep efektivitas kurikulum. Konsep ini mengundang kritik karena sulit diketahui efektivitas kurikulum bagi guru mengajar dan bagi siswa belajar. Kritik selanjutnya, apakah faktor lain mampu berkontribusi efektivitas kurikulum.

#### **2.4.5. Pendekatan Perubahan Kurikulum**

Pengembangan konsep efektivitas kurikulum, dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan untuk memaksimalkan efektivitas mengajar dan belajar di sekolah melalui perubahan kurikulum sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perubahan Kurikulum Simplistik.  
Kurikulum dapat dikembangkan atau diubah secara simplistik pada level individu siswa, program, atau level sekolah. Perubahan ini dapat disesuaikan dengan kondisi level tersebut dengan berpedoman pada kompetensi guru dan karakteristik siswa sebagai dasar untuk mencapai tujuan sekolah. Pendekatan ini berasumsi bahwa guru adalah pasif, kompetensi guru adalah statis, dan perubahan kurikulum dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif oleh pengelola sekolah atau tenaga ahli dari luar sekolah.
- b. Pendekatan pengembangan kompetensi Guru.  
Kompetensi Guru dapat dikembangkan sesuai



dengan tuntutan kurikulum. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan kurikulum dibebankan oleh pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar. Kompetensi guru dapat dikembangkan secara mudah untuk memuaskan semua kebutuhan dan kurikulum sekolah.

- c. Pendekatan Perubahan Kurikulum Dinamis. Kedua pendekatan kurikulum (simplistik dan kompetensi guru) dapat dikembangkan dan diubah secara aktif dan dinamis dengan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan kurikulum melalui fasilitas pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berasumsi bahwa: efektivitas kurikulum adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan siklus keberlanjutan dan proses perubahan kurikulum dan kompetensi guru; kurikulum adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan siklus keberlanjutan dan proses perubahan kurikulum dan kompetensi guru; kurikulum dapat

dikembangkan dan diubah secara efektif ketika guru (yang menerapkan) selalu dilibatkan dalam proses; kompetensi guru dapat dikembangkan tidak hanya untuk memuaskan pada tuntutan kurikulum yang ada atau kurikulum yang diubah melainkan juga untuk mengembangkan kurikulum yang lebih tepat untuk menyesuaikan karakteristik siswa, tujuan sekolah, dan kondisi sekolah; dan perubahan efektivitas kurikulum dapat dilibatkan tidak hanya pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar tetapi juga guru-guru untuk membantu dalam menyusun perencanaan kurikulum dan pembuatan keputusan.

Perbandingan antara ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat Tabel 2.1, pendekatan pertama dan kedua menerapkan program jangka pendek. Keduanya memiliki perspektif secara mekanik yang dapat membantu dan menerapkan perubahan kurikulum. Kedua pendekatan ini menghindari dinamika alamiah

dari perubahan kurikulum dan pengembangan guru serta pentingnya aturan kegiatan guru, keterlibatan dan komitmen perencanaan kurikulum dan pengembangan profesi guru. Karena menghindari dinamika alamiah, perubahan kurikulum melalui dua pendekatan ini tidak dapat membawa efektivitas jangka panjang untuk pengajaran dan pembelajaran. Bahkan, jika ini tidak dilakukan, akan menimbulkan frustrasi guru melalui perlawanan dan protes. Pendekatan ketiga betul-betul bersifat aktif, dinamis dan alamiah sesuai dengan tuntutan kompetensi dan partisipasi guru dalam keterlibatan perencanaan kurikulum, serta bertujuan, perencanaan kurikulum, serta bertujuan jangka panjang, berlanjut, dan bersiklus.

**Tabel 2.1** : Perbandingan Antara Pendekatan-pendekatan Simplistik, Kompetensi Guru, dan Dinamika dalam Perubahan Kurikulum.

jenis Pendekatan	pendekatan Perubahan Kurikulum Simplistik	pendekatan Kompetensi Kurikulum Guru	pendekatan Perubahan Kurikulum Dinamika
arah perubahan	perubahan Satu Arah	perubahan Satu Arah	perubahan Satu arah dan Dinamis
fokus perubahan	kurikulum	kompetensi Guru	kurikulum dan Kompetensi Guru
tujuan memaksimumkan efektifitas	kurikulum mengadaptasi guru dan siswa	adaptasi guru dengan perubahan kurikulum	kurikulum dan dikembangkan
inisiatif perubahan	perubahan direncanakan oleh pengelola/ahli	perubahan dilakukan oleh pengelola/ahli	partisipasi guru dalam perubahan perencanaan
peran guru	perannya pasif	perannya pasif	perannya aktif dan berencana
jangka waktu	jangka pendek	jangka pendek	jangka panjang, berlanjut & siklus

Pendekatan perubahan kurikulum perlu menggunakan suatu perspektif jangka panjang. Perspektif ini memerlukan konsistensi konsep strategi manajemen sekolah dengan analisis multilevel di sekolah dan menekankan pengembangan staf pada level individu, kelompok dan sekolah. Aturan dan partisipasi guru diasumsikan betul-betul amat penting dalam perencanaan dan perubahan kurikulum. Pendekatan ini mencari bentuk yang lebih meyakinkan untuk mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran melalui perubahan dan pengembangan kurikulum dan kompetensi guru.

Pendekatan dinamis lebih memiliki kekuatan dalam perubahan konsepsi pengembangan kurikulum. Seperti yang telah disebutkandu atas, perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru, yang tercakup dan dalam pendekatan dinamis, adalah amat penting untuk pengembangan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana inisiatif sekolah untuk mempertahankan

efektivitas pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan tujuan-tujuan sekolah? Bagaimana pelaksanaan MMBS mampu berkontribusi pendekatan perubahan kurikulum?

Bila menggunakan konsep dinamis kurikulum, semua bentuk perubahan kurikulum yang terjadi dalam suatu konteks organisasi meliputi antara lain faktor guru, norma kelompok, struktur organisasi, budaya sekolah, pemberian insentif gaji, dan kepemimpinan. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara perubahan kurikulum dan pengembangan guru apabila terdapat faktor-faktor organisasi? Hal ini telah dijelaskan sebelumnya, MMBS dapat berinisiatifi dan menyokong suatu proses berlanjut untuk pengembangan sekolah yang meliputi perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru. Didasarkan pada konsep manajemen pada level individu, kelompok dan pengembangan kompetensi guru. Didasarkan pada konsep manajemen pada level individu, kelompok dan sekolah, kontribusi MMBS

terhadap perubahan kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru terjadi dalam tiga level konteks organisasi sekolah yang meliputi level individu, level kelompok/program, dan level sekolah. Perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru merupakan pengembangan mutual yaitu dikembangkan satu sama lain dan diperkuat oleh setiap tiga level konten organisasi sekolah dalam waktu jangka panjang.

Perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru pada level individu dipengaruhi oleh hirarki level kelompok atau program dan level sekolah secara menyeluruh. Efektivitas perubahan kurikulum pada level kelas atau individu (yaitu: pengaruh pada pengajaran dan pembelajaran) ditetapkan secara langsung oleh interaksi antara perubahan kurikulum dan kompetensi guru dan karakteristik siswa dan kelas; dan juga dipengaruhi secara langsung oleh perubahan kurikulum dan pengembangan guru pada level

kelompok/program dan pada level sekolah secara menyeluruh.

Berdasarkan prinsip kesesuaian MMBS efektivitas perubahan kurikulum dapat dipengaruhi oleh dua bentuk kesesuaian: (1) kesesuaian antara perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru dan (2) kesesuaian antara level. Kesesuaian ditetapkan dalam konsep (kognitif) konsistensi dalam tujuan, objektif, nilai dan asumsi (tentang perubahan, pengembangan, manajemen, pengajaran dan pembelajaran) dan konsistensi dalam operasional (tentang koordinasi, perluasan yang baik, kesesuaian refleksi kekuatan iklim sekolah, yaitu kekuatan tukar menukar nilai, kepercayaan dan menetapkan efektivitas sekolah. Kesesuaian di antara level merupakan perubahan dan pengembangan efektivitas perubahan kurikulum untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah.



#### 2.4.6. Desain Kurikulum

Pertanyaan mendasar dalam masalah ini adalah, apakah yang dimaksud dengan desain kurikulum? apa urgensinya desain kurikulum? Kemana orientasi Desain Kurikulum? Tiga pertanyaan di atas wajib untuk dijawab dalam rangka demokratisasi dan implementasi politik pendidikan era reformasi.

Desain kurikulum adalah rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas seorang desainer kurikulum sama halnya dengan tugas arsitektur. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi bangunan terlebih dahulu seorang arsitek harus merancang model bangunan yang akan dibangun.<sup>35</sup>

Berkaitan desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang dapat dilihat dari dua

---

<sup>35</sup> Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, hal.76

dimensi, yakni dimensi vertical dan dimensi horizontal.<sup>36</sup> Dimensi vertika menyangkut penyusunan sekuen bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Dan desain horizontal menyangkut dari lingkupi isi kurikulum. Susunan ini sering diintegrasikan dengan prose belajar-mengajar.

## 2.5. Evaluasi Kurikulum

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *Evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan .

Pengertian tentang evaluasi kurikulum, menjadi salah satu bentuk yang berharap dapat mengevaluasi program kurikulum dalam proses pendidikan, hal tersebut menegaskan bukan menjadi satu-satunya yang

---

<sup>36</sup> Sukmadinata, 2007, *op.cit*

menjadi faktor dominan dalam pendidikan sehingga perlu penguatan kurikulum yaitu pada aspek sumberdaya manusia. Sedangkan dalam bentuk pengumpulannya, evaluasi kurikulum ialah kegiatan yang sistematis terstruktur mengumpulkan sumber-sumber informasi mengenai suatu kurikulum yang bertujuan menjadi satu pertimbangan tentang nilai dan arti terhadap kurikulum dalam konteks yang sama .

Kemudian definisi lain, mengatakan bahwa evaluasi kurikulum menjadi suatu kegiatan yang tersistematis dalam pengumpulan informasi mengenai kurikulum yang menjadi pertimbangan terhadap nilai kurikulum dalam konteks tertentu, hal tersebut memberikan pengertian bahwa informasi tambahan yang disusun dalam bentuk kurikulum akan menghasilkan nilai dari kurikulum itu sendiri.<sup>37</sup> Evaluasi membutuhkan proses, dimana proses yang dijalankan guna melihat sejauh mana keberhasilan dicapai

---

<sup>37</sup> Hasan, Hamid. S. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014, hal.86

berdasarkan kesesuaian antara efektifitas dan efisiensi yang diterapkan, sehingga dapat dilihat program yang dihasilkan dirasakan manfaat dan dampak yang dirasakannya.

Penyesuaian evaluasi kurikulum di sekolah menjadi hal penting dimana yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya meliputi sarana prasarana yang memadai, aktivitas siswa yang menunjang dan kesiapan guru yang solid hal ini memberi gambaran bahwa jelaskan dalam evaluasi semua komponen harus terakomodir menjadi satu penilaian yang komprehensif.<sup>38</sup>

Pentingnya evaluasi kurikulum bertujuan memperlancar proses pelaksanaan kurikulum di lapangan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dalam pengertian lain evaluasi terhadap kurikulum menjadi bagian penting dalam rangka keberlanjutan proses yang terjadi di dunia pendidikan

---

<sup>38</sup> Nugraha, E. & Syarifudin, E. *Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-Kota Serang*. Jurnal Visipena Volume 11 Nomor 2, Desember 2020, pp. 228-242

bagi semua pihak. Harapan dari evaluasi kurikulum ini dengan cara selalu memperbaiki seluruh komponen kurikulum itu sendiri sehingga salah satu tujuan pendidikan yang berkualitas tercapai tentunya melalui tahapan yang ada sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan dari sistem pendidikan itu sendiri.

Terdapat beberapa karakteristik kurikulum yang dikembangkan antara lain inovasi yang berskala nasional dengan adanya pembiasaan terhadap kegiatan meneliti dalam kategori psikometris dibanding kebiasaan lama meneliti sosial.<sup>39</sup> Dengan<sup>40</sup> demikian tahapan terakhir dari proses kurikulum dalam sistem pendidikan dengan menggunakan kebijakan evaluasi yang meliputi moral judgement, evaluasi sebagai faktor penentu keputusan dan evaluasi sebagai konsesi nilai .

---

<sup>39</sup> Fathurrahman, Muhammad. *Model Model Pembelajaran Inovatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.

<sup>40</sup> Mehrens, W.A, and Lehmann, I.J. *Measurement and Evaluation in Education and Psychology*. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1991, hal.98

Dalam setiap langkahh evaluasi, sikap seorang evaluator dapat memberikan implikasi terhadap keputusan-keputusan pendidikan, dimana sebagian besar kegiatan kebijakan politik dikategorikan menjadi evaluasi bidang pendidikan dan kurikulum masuk tiga jenis antara lain evaluasi birokratik, evaluatif dan demokratik

Evaluasi merupakan penentuan nilai sesuatu. Termasuk perolehan informasi untuk digunakan dalam penghargaan/penilaian suatu program, produk, prosedur atau tujuan, atau kegunaan pendekatan lain yang potensial yang dirancang untuk mencapai tujuan/sasaran yang diterapkan. Menurut Mehrens dan Lehmann, evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Evaluasi berarti penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Melalui evaluasi guru

dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pelajaran serta ketepatan atau keefektifan itu merupakan unsur-unsur di dalam organisasi belajar mengajar yang wajar. Antar pengajaran dan evaluasi terdapat hubungan timbal balik, prosedur evaluasi tertentu menuntut terselenggaranya program pengajaran yang sesuai dan sebaliknya suatu pendekatan pengajaran dengan keharusan tertentu menurut usaha-usaha evaluasi tertentu pula.

Melalui penilaian pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya, dengan evaluasi guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai siswa. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik yang dapat dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya, sejalan dengan itu Kimball Wiles, evaluasi adalah suatu proses pembuatan pertimbangan-

pertimbangan itu dapat berupa meningkatkan tujuan, mengumpulkan bukti-bukti tentang pertumbuhan atau kemunduran dalam mencapai suatu tujuan merevisi prosedur dan tujuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas.<sup>41</sup>

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk pengertian yang serupa dengan evaluasi, antara lain *measurement* atau pengukuran, *assessment* atau penafsiran dan *test* serta penilaian. Keempat istilah itu kadang-kadang digunakan secara bergantian dan dianggap memiliki pengertian yang sama, padahal kegiatannya memiliki perbedaan.

Measurement atau pengukuran diartikan sebagai proses menentukan luas kualitas atau kuantitas. Dengan kata lain, pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu yang dapat di kuantitaskan, yang diperoleh dengan cara test atau cara lainnya. Dengan kata lain, *assessment*

---

<sup>41</sup> Wiles, Kimball. *Supervision For Better Schools*. Third Edition. USA: Prentice-Hall, 1967, hal.87



kelihatannya sebatas mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran.

Test adalah pernyataan-pernyataan yang harus dijawab atas perintah-perintah yang diajukan, yang mendasarkan bagaimana test menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah penyidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau test yang lain. Sedangkan penilaian adalah pengambil suatu keputusan, terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Oleh karenanya, penilaian bersifat kualitatif.<sup>42</sup>

### **2.5.1. Evaluasi Dalam Pendidikan**

Pada waktu-waktu tertentu selama satu periode guru selalu mengadakan evaluasi. Evaluasi berarti penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Melalui evaluasi guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian

---

<sup>42</sup> Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal.54

tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran serta ketepatan atau keefektifan penggunaan metode mengajar, dengan perkataan lain, evaluasi itu merupakan unsur di dalam organisasi belajar mengajar yang wajar.<sup>2</sup> Antara pengajaran dan evaluasi terdapat hubungan timbal balik, prosedur evaluasi tertentu menuntut terselenggaranya program pengajaran yang sesuai dan sebaliknya suatu pendekatan pengajaran dengan kekhususan tertentu menurut usaha-usaha evaluasi tertentu pula.<sup>3</sup> Melalui penelaahan pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya, dengan evaluasi guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai siswa. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik yang dapat dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Sejalan dengan itu evaluasi adalah suatu proses pembuatan pertimbangan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Kimbal, *op cit*

Pertimbangan itu dapat berupa meningkatkan tujuan, mengumpulkan bukti-bukti tentang pertumbuhan atau kemunduran dalam mencapai suatu tujuan, merevisi prosedur dan tujuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Tujuan evaluasi dalam pendidikan dapat dikaitkan dengan perencanaan pengolahan dan tindak lanjut baik yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Muhibbin menyatakan bahwa tujuan evaluasi dalam pendidikan adalah:<sup>44</sup>

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai siswa dalam suatu waktu proses belajar tertentu;
2. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok kelasnya;
3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar;
4. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah

---

<sup>44</sup> Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 78

- mendayagunakan kemampuan kognitifnya;
5. Untuk mengetahui tingkat daya guna hasil guna metode mengajar guru.

Pada bagian lain Thorndike dan Hagen mengungkapkan bahwa tujuan dan fungsi evaluasi dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut:

Pengajaran dan hasil belajar;

1. Diagnosis;
2. Penempatan;
3. Bimbingan dan penyuluhan;
4. Seleksi;
5. Kurikulum; dan
6. Kemasyarakatan dan kebijakan.

Selanjutnya menurut Sugiarto, fungsi evaluasi dalam pendidikan adalah:

1. Menilai kebutuhan dan kesiapan siswa;
2. Mengadakan diagnosa;

3. Untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai;
4. Untuk bimbingan dan penyuluhan;
5. Sebagai umpan balik bagi sistem pengajaran;
6. Membantu cara belajar dan memotivasi siswa.

Evaluasi selain berguna untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa juga dapat memberikan gambaran tentang hasil atau tingkat pencapaian program pengajaran secara menyeluruh. Penggunaan prosedur yang sistematis akan memberikan gambaran yang lengkap dan obyektif kepada guru tentang kemajuan setiap siswa. Proses penilaian yang lengkap akan membantu guru untuk melaporkan perkembangan siswa secara menyeluruh.

Evaluasi yang dilaksanakan dengan baik dan berturut akan berpengaruh kepada ketetapan atau keputusan pengajaran yang diambil sehubungan dengan keberhasilan belajar siswa. Efektivitas dan sukses dalam setiap usaha belajar ditambah oleh evaluasi yang bermutu dan deskriptif semua aspek

dalam belajar.<sup>8</sup> Selain berguna untuk guru dan siswa, evaluasi juga mempunyai fungsi psikologis yang sangat berarti bagi orang tua karena melalui evaluasi, informasi mengenai hasil usaha dan tanggung jawabnya mengembangkan potensi putranya akan terpenuhi. Informasi ini akan mendatangkan rasa pasti kepada orang tua dalam menentukan langkah-langkah untuk kelanjutan pendidikan putranya.

### **2.5.2. Tujuan Dan Kegunaan Evaluasi**

Tujuan penilaian (evaluasi) adalah :<sup>45</sup>

1. Mendeskripsi kecakapan belajar para siswa sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yangditempuhnya.
2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektifitasnya dalam mengubah tingkah laku

---

<sup>45</sup> *Sudjana, Nana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru. Algesindo, 1998, hal.134*

para siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan.

3. Menentukan tindak lanjut hasil penelitian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya.
4. Memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Evaluasi dapat dikelompokkan kedalam empat penggunaan sebagai berikut:

1. Penggunaan Administrasi
2. Penggunaan Intruksional
3. Penggunaan bagi bimbingan dan penyuluhan
4. penggunaan bagi penyelidikan (Reseach)

Supervisor (pengawas) dapat menggunakan data atau hasil-hasil evaluasi untuk menentukan berbagai keperluan antara lain :

- Untuk membantu atau menolong guru-guru dalam

cara mengajar yang lebih baik

- Untuk menentukan status kelas atau murid dalam hubungannya

dengan tujuan-tujuan pokok kurikulum

Bagi guru data hasil tes dapat digunakan untuk :

- a. Menentukan status masing-masing murid dalam berbagai mata pelajaran dan tujuan kurikulum
- b. Mengidentifikasi murid-murid yang pandai (*gifted*) yang Normal (*sedang*), dan yang lambat belajar
- c. Mengelompokan murid di dalam kelas untuk tujuan-tujuan pengajaran
- d. Membuat analisis diagnosis tentang kesulitan-kesulitan murid dan menilai pertumbuhan; dan
- e. Menentukan status individu murid atau kelas pada permulaan atau akhir tahun ajaran atau semester.

### **2.5.3. Kedudukan Evaluasi Dalam Pendidikan**

Ada tiga alasan diperlukan evaluasi dalam dua pendidikan, yaitu : pertama, bahwa terdapat hubungan



interdependensi antara tujuan pendidikan, proses belajar-mengajar, dan prosedur evaluasi. Tujuan pendidikan akan mengarahkan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang seharusnya dilaksanakan sekaligus merupakan kerangka acuan untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar. Kedua, kegiatan terhadap hasil belajar merupakan salah satu ciri pendidik profesional, suatu pekerjaan dipandang profesional bila pekerjaan tersebut memerlukan pendidikan lanjut (*advance education*) dan latihan khusus (*spesial training*). Ketiga, bila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan pendidikan adalah kegiatan manajemen, yang meliputi kegiatan *planning, programming, organizing, actuating, controlling* dan *evaluating*.

Pada waktu-waktu tertentu selama satu periode guru selalu mengadakan evaluasi. Evaluasi berarti penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Melalui evaluasi guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa

terhadap pelajaran serta ketepatan atau keefektifan penggunaan metode mengajar, dengan perkataan lain, evaluasi itu merupakan unsur di dalam organisasi belajar mengajar yang wajar. Antara pengajaran dan evaluasi terdapat hubungan timbal balik, prosedur evaluasi tertentu menuntut terselenggaranya program pengajaran yang sesuai dan sebaliknya suatu pendekatan pengajaran dengan kekhususan tertentu menurut usaha-usaha evaluasi tertentu pula. Melalui penelaahan pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya, dengan evaluasi guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai siswa. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik yang dapat dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Sejalan dengan itu Kimball Willes seperti yang dikutip Subari mengatakan bahwa “Evaluasi adalah suatu proses pembuatan pertimbangan.”

Pertimbangan itu dapat berupa meningkatkan tujuan, mengumpulkan bukti-bukti tentang pertumbuhan atau kemunduran dalam mencapai suatu tujuan, merevisi prosedur dan tujuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas.

Tujuan evaluasi dalam pendidikan dapat dikaitkan dengan perencanaan pengolahan dan tindak lanjut baik yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Muhibbin menyatakan bahwa tujuan evaluasi dalam pendidikan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai siswa dalam  
suatu waktu proses belajar tertentu;
2. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok kelasnya;
3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar;
4. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kemampuan kognitifnya;
5. Untuk mengetahui tingkat daya guna hasil guna

metode mengajar guru.

Pada bagian lain Thorndike dan Hagen mengungkapkan bahwa tujuan dan fungsi evaluasi dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut:

Pengajaran dan hasil belajar;

1. Diagnosis
2. Penempatan;
3. Bimbingan dan penyuluhan;
4. Seleksi;
5. Kurikulum; dan
6. Kemasyarakatan dan kebijakan.

Selanjutnya menurut Sugiarto, fungsi evaluasi dalam pendidikan adalah:

1. Menilai kebutuhan dan kesiapan siswa;
2. Mengadakan diagnosa;
3. Untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai;
4. Untuk bimbingan dan penyuluhan;
5. Sebagai umpan balik bagi sistem pengajaran;
6. Membantu cara belajar dan memotivasi siswa.

Evaluasi selain berguna untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa juga dapat memberikan gambaran tentang hasil atau tingkat pencapaian program pengajaran secara menyeluruh. Penggunaan prosedur yang sistematis akan memberikan gambaran yang lengkap dan obyektif kepada guru tentang kemajuan setiap siswa. Proses penilaian yang lengkap akan membantu guru untuk melaporkan perkembangan siswa secara menyeluruh. Evaluasi yang dilaksanakan dengan baik dan berturut akan berpengaruh kepada ketetapan atau keputusan pengajaran yang diambil sehubungan dengan keberhasilan belajar siswa. Efektivitas dan sukses dalam setiap usaha belajar ditambah oleh evaluasi yang bermutu dan deskriptif semua aspek dalam belajar. Selain berguna untuk guru dan siswa, evaluasi juga mempunyai fungsi psikologis yang sangat berarti bagi orang tua karena melalui evaluasi, informasi mengenai hasil usaha dan tanggung jawabnya mengembangkan potensi putranya akan terpenuhi. Informasi ini akan

mendatangkan rasa pasti kepada orang tua dalam menentukan langkah-langkah untuk kelanjutan pendidikan putranya.

Ada beberapa jenis evaluasi belajar sesuai dengan tujuan dan fungsinya, untuk tingkat sekolah menengah umum sesuai dengan kurikulum yang disempurnakan, dikenal tiga macam evaluasi belajar, yaitu ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir.

Ulangan harian merupakan ulangan yang mencakup bahan kajian satu pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan bertujuan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ulangan umum merupakan ulangan yang mencakup sebelumnya, bertujuan untuk mengetahui daya serap siswa. Sedangkan ujian akhir dilaksanakan pada akhir pendidikan.

#### **2.5.4. Model Evaluasi**

Dalam bukunya: *"Evaluation Without Fear"*, Roger Kaufman dan Susan Thomas mengemukakan 8 model

evaluasi, yaitu:

1. *Scriven's Formative - Summative Model*,
2. *CIPP Model*,
3. *CSE - ECLA Model*,
4. *Stake's Countenance Model*,
5. *Tyler's Model*,
6. *Provus Disperancy Model*,
7. *Scriven's Goal Free Model*, dan
8. *Stake's Resvonsive Model*.

1) Model Evaluasi Focinatif - Sumatif Scriven's.

Menurut Scriven konsep evaluasi model ini meliputi penetapan kriteria ekstrinsik (*output*) dan memperhatikan kualitas suatu tujuan, dan lebih ditekankan pada luas tujuan yang diperoleh. Hal ini juga merupakan penilaian intrinsik tujuan-tujuan model tersebut. Evaluasi formatif meliputi penilaian proses menuju identifikasi tujuan dalam program yang masih terus dikembangkan. Di dalam model ini, skala pertengahan akan ditempatkan dan

memperluas program nyata untuk dihubungkan pada kriteria ini agar dapat diberikan penilaian. Jika program terlihat berkembang baik ini positif. Bagaimanapun jika metode dikhususkan, seperti strategi instruksional, atau penggunaan media, dan tidak dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan (melanjutkan umpan balik), ini dapat digunakan oleh perancang program untuk membuat perubahan-perubahan penting sebelum waktu dan biaya habis. Evaluasi Formatif menekankan pada hal-hal sebagai berikut : Apakah program nyata melaksanakan perencanaan orisinal?, Apakah semua komponen program berfungsi secara efektif atau dilakukan beberapa revisi tertentu?, Dasar pengolahan data, seharusnya program diimplementasikan dilain tempat?, Apakah kesanggupan untuk menemukan peristiwa seharusnya tergabung dalam struktur formal program?

Evaluasi Formatif akan ditempatkan selama 6 minggu dalam pelaksanaan program, dan akan



memusatkan sebagian pertanyaan menarik yang telah dirancang perlengkapan instruksional dan aktifitasnya. Selama 2 minggu pertama menekankan perkembangan situasi, perbaikan dan hasil. Jika instruksi berarti untuk klien, mereka seharusnya mulai mengubah hasil output, dan penggunaan hasil deskriminasi. Jika mereka mempersiapkan tugas interview. Observasi pada bagian instruktur dapat disediakan data disini. Jika tidak merubah adalah kenyataan.

Evaluasi Sumatif, pada bagian lain digunakan dalam menentukan penilaian tingkat akhir, tujuan proyek akhir program yang dihubungkan secara aktual. Hal ini merupakan peristiwa nyata, disaat rekomendasi selama program diganti dengan baik dan pengaruhnya ditentukan oleh tersedianya waktu, biaya dan staf untuk menerapkan program pada kurun waktu kedua. Evaluasi Sumatif ditujukan menjawab hal sebagai berikut : Apakah klien mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi?,

Sejauh mana peningkatan kesesuaian dan perubahan tingkah laku akibat program ini?, Sudahkah tujuan-tujuan obyektifitas yang seharusnya dilakukan oleh pengembang program diperoleh?

Evaluasi Sumatif dilaksanakan setelah program lengkap, dan issue diarahkan secara menyeluruh, serta efektif pada program.

## 2) Model CIPP

Disarikan oleh Stufflebeam diaplikasikan dalam evaluasi proyek ini dengan menggunakan 2 tipe, yaitu Context dan Input, karena proyek ini dibatasi pada studi kelayakan.<sup>46</sup> Evaluasi Context dalam mode kontingensi digunakan untuk asses atribut metode, teknik dan praktek yang dipakai dalam area permasalahan dan kemudian sebuah evaluasi input untuk perubahan yang neomobolistic digunakan untuk asses kedua

---

<sup>46</sup> Stufflebeam, D.L. *CIPP Evaluation Model Checklist. Evaluation Checklists Project.* [www.wmich.edu/evalctr/checklist](http://www.wmich.edu/evalctr/checklist), 2007.

kemampuan departemen pendidikan untuk mengansumsikan pertanggungjawaban pengambilan keputusan untuk prospective program dan strategi dimana departemen pendidikan asing dapat memperoleh tujuannya dari prospective program.

Tujuan evaluasi Context sebagai asisten dalam rangka membentuk tujuan-tujuan. Dua metode dari evaluasi Context adalah kontingensi dan kongruensi. Karena mode kontingensi melibatkan identifikasi kesempatan dan kekuatan dalam batasan-batasan sistem yang cepat untuk mempromosikan perbaikan-perbaikan didalamnya, karakteristik teknik dari tipe ini untuk *probe* kekuatan external dan untuk memprediksikannya ke masa depan.

Evaluasi input sebagai penyedia informasi untuk menentukan bagaimana cara menggunakan sumberdaya sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan program. Penekanan pada model CIPP adalah pada penyediaan informasi bagi para pembuat keputusan

selain evaluator. Dalam model formatif-sumatifnya, menekankan perlunya untuk menentukan tujuan dan penyediaan informasi bagi perancang program dan para implementor, pada CIPP model, penekanan adalah lawannya. Dimana data dikumpulkan dan informasi dipresentasikan pada orang lain yang akan menentukan manfaatnya. Elemen pentingnya adalah mengidentifikasi, memperoleh dan menyediakan informasi yang akan digunakan dalam proses pengembangan alternatif keputusan. Identifikasi informasi biasanya dikerjakan bersamaan, antara evaluator dengan pembuat keputusan yang masing-masing mengasumsikan sebuah peran aktif dalam penentuan tipe informasi yang dibutuhkan. Lalu, pengumpulan dan analisa data actual dilakukan oleh evaluator dan pembuat keputusan.

Pada model ini, evaluator terkadang seseorang yang tidak berhubungan langsung dengan program, tetapi seseorang yang bekerja dengan yang terlibat dalam program (para pembuat keputusan, atau mereka

yang sangat bertanggung jawab atas jalan atau tidaknya keputusan). Catat bahwa evaluator bekerja dengan staf program dalam menentukan informasi yang dikumpulkan begitu juga dalam menyediakan pengertian/ penjelasan atas penyediaan dan interpretasi data yang dipakai dalam keputusan. Sehingga, model CIPP memerlukan usaha tim dengan penekanan pada usaha kerjasama antara perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Inti dari model ini terlihat pada definisi dari evaluasi adalah pendeskripsian, perolehan dan penyediaan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Setiap segmen dari definisi itu menyediakan sebuah pernyataan aksi bagi para evaluator dan menentukan tiga langkah dasar model ini: pertama pendeskripsian (*delineating*) menunjukkan pada tipe informasi yang dibutuhkan para pembuat keputusan. Spesifikasi dari informasi dan data diperoleh dengan cara dialog antar evaluator dan pembuat keputusan. Secara bersama mereka mendiskusikan dan

menentukan data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah rencana untuk memperoleh data tersebut. Proses spesifikasi akan termasuk formulasi tujuan dan sasaran dan identifikasi data yang akan memberikan informasi. Kedua perolehan (*obtaining*) mengacu pada proses pengumpulan data aktual. Evaluator berkuasa pada pengumpulan data seperti yang direncanakan pada proses *delineating*. Analisa data juga terjadi pada fase ini. Penekanan disini adalah pada pengumpulan dan persiapan informasi yang dibutuhkan untuk proses pembuatan keputusan. Beban bagi evaluator dapat dikurangi pada titik ini melalui kerjasama dan partisipasi aktif dari orang-orang yang diidentifikasi dalam daftar persediaan sumberdaya (*resource inventory*), atau daftar alat, instrumen dan orang serta sumberdaya lain yang tersedia buat anda untuk digunakan bagi proses evaluasi). Beberapa data dapat saja sudah tersedia dan pengajar atau lainnya dapat saja

membantu dalam proses pengumpulan data. Ketiga penyediaan (*providing*) mengacu pada versi informasi dengan maksud untuk meningkatkan kegunaannya bagi pembuat keputusan. Hal ini akan termasuk sintesa dari informasi dan persiapan table dan grafik yang akan membantu pekerjaan pembuat keputusan. Pengenalan interpretasi data dapat dibuat oleh evaluator. Akan tetapi sebagaimana pada tahap delineating, evaluator juga harus bekerjasama secara erat dengan pembuat keputusan. Pernyataan dibuat dengan dasar evaluasi harus menunjukkan sebuah usaha kolaborasi.

Penekanan pada tiga fase ini adalah pada informasi, informasi untuk keputusan. Keputusan seperti apa yang mungkin dengan model CIPP ini? Stufflebeam telah mengidentifikasi empat tipe keputusan yang mungkin, berdasarkan CIPP model. Setiap tipe keputusan ini memiliki tipe evaluasi yang paralel dengan tipe evaluasi (dan dari tipe evaluasi inilah

nama bagi model berasal):

Keputusan evaluasi antara lain:

Planning (untuk menentukan tujuan)

Context

Structuring (untuk mendesain instruksi)

Input

Implementing (untuk menggunakan atau memperbaiki instruksi)      Process

Recycling (untuk menilai produk, out put atau hasil)

Product

Biasanya keempat segmen dari CIPP model digunakan, proses pembuatan keputusan dapat digunakan dalam perencanaan, pendesainan, implementasi dan pencapaian teknik instruksional. Masing-masing bermanfaat dalam seting yang tertentu atau aspek dari sebuah program total. Akan tetapi, seseorang boleh memilih salah satu dari empat fase ini jika sesuai dengan keperluan dari evaluasi.



Evaluasi context bermanfaat dapat fase awal dari pengembangan program, identifikasi kebutuhan dan pendesainan program. Biasanya sebuah deskripsi menyeluruh dari program yang ada dikembangkan dan kemudian program tersebut dibandingkan dengan program yang potensial. Melalui proses ini sebuah set khusus dari tujuan dikembangkan. Tujuan ini lalu digunakan untuk mendesain sebuah program instruksional. Evaluasi input digunakan untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang didefinisikan pada evaluasi contexts. Dapatkah sumberdaya yang ada direlokasikan atau perlukah tambahan sumberdaya lain ? penekanannya adalah pada pengumpulan informasi yang akan digunakan oleh pembuat keputusan. Disini keputusan berkisar seputar issue tentang bagaimana menstrukturisasi program instruksional agar dapat memanfaatkan sumberdaya sebaik mungkin guna mencapai

tujuan program. Evaluasi program memiliki banyak hal yang sama dengan evaluasi formatif. Keduanya dipakai jika program sedang berjalan dan berguna dalam menentukan apakah program berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Evaluasi program yang sedang berjalan (*ongoing evaluation*) biasanya bermanfaat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan program yang mungkin tidak teridentifikasi setelah selesainya program. Sebuah contoh dapat menjadi suatu pengamatan dari instruksi dan interaksi guru-murid sementara proses belajar mengajar berlangsung. Pengumpulan data disini dapat digunakan untuk memperbaiki program sebelum terlambat. Aspek dari model CIPP ini berbeda dengan evaluasi formatif Scriven pada penekanan atas pengumpulan informasi untuk menyediakan sebuah dasar bagi pembuatan keputusan yang diinformasikan mengenai kemajuan dari program dibandingkan membuat program itu berubah.

Evaluasi product terjadi setelah program, dengan penekanan pada pengumpulan informasi yang diperlukan bagi keputusan yang akan dibuat dengan pertimbangan program tersebut. Sebagai catatan awal sebuah keputusan "recycling" dapat dibuat. Haruskah program dilanjutkan, dimodifikasi atau ditunda? Haruskah tujuan didefinisikan? Apakah keputusan yang sesuai yang dibuat dengan mempertimbangkan disposisi dari program? Penekanan disini adalah pada penyediaan data yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan terbaik.

Model CIPP ini cukup komprehensif dan berguna dalam sebuah fase program perancangan, pengembangan dan implementasi. Model ini lebih komprehensif dibandingkan model evaluasi Formatif-Sumatif Scriven dalam penyediaan data bagi pembuatan keputusan selama fase perencanaan, implementasi sampai pencapaian akhir program. Karena model ini peduli dengan pengembangan program sejak dari tahap paling awal,

model evaluasi ini dapat dimulai dengan sebuah pencapaian kebutuhan external atau melihat pada hasilnya dan menggabungkan kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi ini ke dalam perencanaan program. Akan tetapi model CIPP, seperti model lain yang didiskusikan disini, biasanya berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai proses, produk dan output.

Model CIPP biasanya bermanfaat jika dokumentas dari kebutuhan, tujuan dan sasaran diperlukan dan akan menjadi pilihan yang baik saat perancangan sebuah proposal untuk sebuah program akan diajukan ke badan pemberi dana. Sebagai contoh, informasi yang terkadang diperlukan oleh badan pemberi dana adalah pengembangan dari sebuah rasionalisasi tujuan yang teridentifikasi dari program yang diajukan. Proses evaluasi context akan membantu dalam aspek perencanaan ini dimana status dari program yang ada dijelaskan, dan lalu program dievaluasi untuk melihat pada problem

atau gap yang ada. Dokumentasi yang lengkap dari program yang ada dan fakta bahwa program tersebut kurang memenuhi kebutuhan, harus menyediakan dasar bagi pengembangan program.

Evaluasi input akan berguna dalam pengembangan proposal dimana dapat menyediakan informasi dari alokasi kebutuhan sumberdaya bagi program yang diajukan. Identifikasi dari sumberdaya yang ada bermanfaat untuk berjalannya program dan dapat membantu bagi pengembangan program untuk memformulasikan sebuah perkiraan biaya dan sumberdaya yang lebih realistis yang diperlukan untuk mengimplementasikan program.

Sebuah deskripsi yang lengkap dari sumberdaya yang ada akan memungkinkan pilihan yang lebih baik sehingga diperoleh metode yang terbaik guna mengalokasikan sumberdaya guna mencapai tujuan program. Evaluasi proses dan produk jelas tak akan dapat dipenuhi selama proses penulisan proposal. Akan tetapi, kedua evaluasi ini dapat

memberikan petunjuk untuk informasi yang perlu dikumpulkan selama dan setelah program berjalan. Evaluator harus terlibat dalam setiap bagian di keseluruhan proses perencanaan program dalam model CIPP ini.

### 3) Model Evaluasi CSE-UCLA

Nama CSE-UCLA ini diambil dari nama lokasi dimana evaluasi ini dijalankan yaitu Center for the Study of Evaluation at the University of California. Ada kesamaan antara model CSE dengan model CIPP, kedua model ini meliputi banyak hal yang berguna untuk perencanaan, perkembangan proses penilaian. Seperti pada model CIPP, model CSE memerlukan rangkaian-rangkaian keputusan yang akan digunakan pada tiap-tiap tingkatan. Kegiatan CSE sebagai berikut: pengenalan masalah, merumuskan tujuan, memberi penekanan pada kumpulan informasi data dan mengenali kepentingan-kepentingan dokumentasi. Memilih dan memutuskan masalah, memonitor meliputi

pengumpulan pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa keterangan tentang program alternatif dipilih. Program pelaksanaan selama pada tingkatan ini, memonitor akan dapat menyesuaikan secara hati-hati pada kejadian apakah program tersebut sebagai pelaksana. Observasi pada program, klien-klien, instruktur-instruktur, dan keadaan dapat menyediakan barang-barang berharga berupa pengetahuan-pengetahuan sebagai apa yang terjadi. Pada tempat dimana informasi dapat dengan hati-hati membantu didalam penerapan apakah program tersebut menyampaikan secara tepat dalam penetapan. Memodifikasi program, memperbaiki program, dan akan memasukkan informasi yang telah dihimpun dalam tingkatan ketiga. Monitor pada tingkatan ini meliputi identifikasi pada komponen-komponen program yang bisa menjadi pekerjaan. Kesimpulan akhir, meliputi keseluruhan, tamatnya pernyataan keefektifan program atau berharganya program. Apakah secara

keseluruhan program tersebut diperlukan? Apakah program itu akan menjadi pelaksanaan, meninjau kembali atau melimpahkannya kembali? Terkadang pada tingkatan ke-5 ini evaluasi meliputi nilai persiapan dan tugas tes dalam tes-tes.

#### 4) Model Evaluasi Stake's Countenance

Model keempat ini adalah merupakan reaksi terhadap model sebelumnya, yaitu CIPP dan CSE-UCLA. Model yang merupakan model evaluasi yang menitik beratkan pada keputusan yang dibuat selama evaluasi berlangsung. Persamaan model Stake's dengan CIPP dan CSE adalah penilaiannya cenderung bersifat komprehensif dan dimulai dengan proses evaluasi selama dalam tahap perencanaan pengembangan program, bedanya Stake's harus lebih rinci dan jelas. Stake's membagi tiga aspek yang harus diperhatikan oleh evaluator, yaitu: pertama *Antecedent Phase* (tahap persiapan), sebelum program dilaksanakan, apa saja yang perlu disiapkan pada tahap ini, apa kegiatan ini dapat



memberikan efek terhadap hasil program yang akan diperoleh, termasuk kondisi yang akan muncul, bagaimana dengan sumber/model/input yang ada pada system ini dikembangkan seperti tenaga, keuangan, dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua *Transactions Phase* (tahap transaksi/proses interaksi), tahap ini mencakup rencana kegiatan maupun proses pelaksanaannya dilapangan, termasuk didalamnya urutan kegiatan, penjadwalan waktu, bentuk interaksi guru-murid, cara belajar dikelas dan sebagainya. Selama program berlangsung, apa yang terjadi, dan apakah program ini seperti yang diharapkan oleh pengembang program? Ketiga *Outcome* (keluaran), atau pengukuran efek program setelah selesai dilaksanakan, apakah program sesuai dengan yang direncanakan dan apakah klien melaksanakan program lebih baik daripada sebelumnya.

Yang menonjol dari model Stakes ini adalah memaksa evaluator menggambarkan kejadian, aktivitas, dan kondisi yang muncul sebelumnya,

selama dan sesudah pelaksanaan evaluasi serta menetapkan standar yang khusus.

Berbeda dengan model CIPP dan CSE yang walaupun menitik beratkan pada proses pengambilan keputusan, tetapi kedua model tersebut tidak memaksa evaluator menetapkan standar terhadap program yang dinilai.

5) Model Pencapaian Hasil dari Tyler (*Tyler's Goal Attainment Model*).

Model evaluasi pencapaian hasil dari Tyler merupakan salah satu model yang paling tua dibandingkan model-model lainnya yang telah diterangkan disini. Penekanan model ini adalah pada penentuan sampai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditentukan program akan diperoleh. Setiap tujuan dituangkan kedalam obyektif tingkah laku yang dapat diukur. Model Tyler kurang komprehensif dibandingkan dengan model-model lainnya, namun model ini memiliki sebuah aspek yang penting yang tidak dinyatakan dengan tegas pada model-model

lain: pernyataan tentang tujuan dalam bentuk obyektif tingkah laku yang dapat diukur. Karena perlu mengukur hasil sebelum membuat keputusan, maka tujuan pengukuran dalam tahap awal perencanaan sangatlah penting.

#### 6) Model Kesenjangan Provus (*Provus's Discrepancy Model*)

Yang dimaksud kesenjangan dalam model "provus" ini adalah kesenjangan antara standar yang dibuat dengan pelaksanaannya, baik selama berlangsungnya program maupun sesudah program selesai Sebagaimana model Stake, standar yang dibuat untuk menentukan keberhasilan program harus disebutkan secara rinci pada permulaan. Tetapi bagaimanapun keputusan yang dibuat untuk menentukan keberhasilan program melibatkan banyak hal, tidak hanya perbandingan antara pelaksanaan program dan standar yang ditentukan. Bilamana ditemukan kesenjangan dalam pelaksanaan program, keputusan harus dibuat yaitu mengubah program atau standarnya (model evaluasi lain tidak membicarakan

kemungkinan merubah standar, tetapi hanya merevisi programnya.

Model ini menganalisa kesenjangan pelaksanaan program dalam 4 dimensi, yaitu sejak dimulainya program, pelaksanaan dan selesainya program. Setiap dimensi sistem yang dikembangkan perlu kriteria yang tegas untuk jadi ukuran evaluasi. Dimensi pertama Design, dihubungkan dengan rencana (fase penyusunan/installation). Dimensi kedua Operation Program, proses pelaksanaan. Pada fase ini analisis terhadap kesenjangan dilihat, apakah program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesenjangan yang ditemukan pada fase ini bisa mempercepat keputusan untuk mengganti, meneruskan atau bahkan menghentikan program. Dimensi ketiga Intern Product, hasil belajar jangka pendek. Analisis terhadap kesenjangan yang muncul sesudah program selesai dilaksanakan untuk menjawab apakah program yang dilaksanakan mencapai tujuan yang ditentukan. Kesenjangan pada fase ini dapat digunakan

untuk menentukan keberhasilan program dilihat dari tujuan semula. Dimensi keempat Terminal Product, hasil belajar jangka panjang. Analisis terhadap kesenjangan dapat terjadi pada model-model lainnya, yaitu terdiri dari analisis baik buruknya suatu program dibandingkan dengan program lain. Walaupun kesenjangan yang digunakan model Provus terdapat pada bermacam-macam tahap pelaksanaan program, berbeda dengan model CIPP dan CSE, ketiga model ini menitik beratkan pada pembagian informasi untuk membuat keputusan. Yang membedakan model Pruvus dari CIPP dan CSE yaitu adanya tambahan informasi tentang "*cost benefit analysis*".

#### 7) Model Evaluasi Bebas Tujuan Scriven (*Scriven's Goal Free Model*)

Ada pendapat bahwa evaluasi memperhatikan kepada tujuan yang sebelumnya telah ditentukan dapat membatasi jumlah (kadang-kadang kualitas) dari suatu informasi yang tersedia untuk membuat keputusan mengenai suatu program. Dengan

memperluas pandangan seseorang sampai keseluruhan program dan bukan hanya pada isi tertentu saja yang ditetapkan dalam pernyataan mengenai tujuan program, orang mungkin mencatat hasil yang diharapkan juga hasil yang tidak diharapkan. Scriven mengusulkan evaluasi bebas tujuan dalam usaha untuk memberi dasar informasi yang lebih luas untuk proses evaluasi. Dalam mode-model evaluasi tersebut, dimana produk atau hasil dari suatu program dibandingkan dengan seperangkat tujuan program, apapun hasil yang ditemukan secara tak disengaja atau efek samping tidak akan disertakan dalam proses evaluasi utama dan mungkin sekaligus dilupakan. Jadi, penekanannya adalah pada hasil, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Dasar pemikiran atau alasan dari evaluasi bebas tujuan adalah bahwa dengan tidak membatasi seseorang, atau menjadikan evaluasi cenderung pada tujuan yang telah ditetapkan, evaluator bisa lebih terbuka terhadap pengaruh keseluruhan program. Baik positif maupun negatif, diharapkan

atau tidak diharapkan.

Evaluasi bebas tujuan tidak harus benar-benar bebas dari tujuan, tetapi evaluasi ini harus bebas dari tujuan program atau pembuat program. Tujuan masyarakat, tujuan konsumen, atau bahkan tujuan lembaga/ agen pembiayaan mungkin perlu dipertimbangkan, tetapi perlu dicatat bahwa ini mungkin atau mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan program. Namun jika evaluator menggunakan salah satu dari tujuan-tujuan ini, mereka nantinya harus menunjukkan bahwa tujuan tersebut sebenarnya sesuai dengan evaluasi yang ada sekarang, evaluator tidak bisa secara semauanya menyerahkan tujuan kepada suatu program dan mengevaluasi program berdasarkan tujuan tersebut.

Evaluasi bebas tujuan bisa digunakan selama program (evaluasi-formatif) atau setelah program (evaluasi sumatif). Evaluasi ini bisa berbasis internal maupun eksternal. Dengan kata lain, evaluasi ini berguna dalam berbagai latar belakang dan mungkin

digunakan selama atau setelah program oleh mereka yang terlibat dalam proses penyampaian program atau oleh mereka yang berada diluar program.

8) Model Evaluasi Responsif dari Stake (*Stake's Responsive Evaluation Model*)

Beberapa tahun setelah Stake membentuk model "countenance" (roman wajah), dia mengusulkan model lain, "hard data oriented" (pendekatan data mentah) yang disebut evaluasi responsive. Model evaluasi Responsif dan Stake adalah penilaian dan pengukuran tentang data mentah mengenai nilai test.

Perbedaan yang penting antara model Evaluasi Responsif dengan model yang terdahulu terletak pada penekanan yang kurang teliti dalam pengukuran, pengambilan data pretes, postes dan analisis statistik.

Sifat khusus Evaluasi Responsif, yaitu: pertama lebih menekankan kepada hasil alami daripada mempersiapkan laporan evaluasi formal. Kedua menekankan kepada masalah apa yang terjadi bukan kepada bagaimana masalah itu terjadi. Ketiga



menekankan kepada kegiatan-kegiatan program secara langsung dengan menggambarkan apa yang terjadi. Model Evaluasi Responsif sangat berguna dalam evaluasi seni dan program-program kemanusiaan dan tipe sama yang lain yang menetapkan tujuan dan penyelesaian yang luar biasa menantang.

Kegunaan Evaluasi Responsif: pertama digunakan selama Evaluasi Formatif. Kedua membantu dalam Evaluasi Sumatif yaitu menyiapkan pemahaman aktivitas program dengan kelebihan dan kelemahannya.

Pelaksanaan Evaluasi Responsif yaitu:

1. Rencana evaluasi harus mengandung penekanan kepada pengamatan kegiatan program,
2. Seluruh yang terlibat dalam proses ini harus berhimpun untuk dapat melakukan pengamatan,
3. Perhatian harus diambil dari macam-macam pendapat, sehingga kemungkinan adanya feedback positif dan negatif.

### **2.5.5. Monitoring dan Evaluasi**

Panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan Direktorat PLB tahun 2007, mengemukakan bahwa, kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek, manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun.

Evaluasi atau penilaian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menyatakan bahwa dalam penilaian dalam setting inklusif ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu:

- 1) Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem

penilaian yang berlaku pada sekolah reguler.

2) Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa.

3) Apabila menggunakan kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (*base line*)

## **2.6. Kurikulum Madrasah Inklusi**

### **2.6.1. Pengertian Kurikulum Madrasah Inklusi**

Kurikulum madrasah inklusi pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum yaitu kurikulum 2013, KTSP dan program pembelajaran individu, karena peserta didik dari beragam karakteristik peserta didik yang antara lain terdiri dari peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus perlu dilakukan modifikasi dikembangkan menjadi empat komponen antara lain

komponen duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi yang disebut dengan model modifikasi dengan komponen tujuan, isi, proses dan evaluasi.<sup>47</sup> Model kurikulum pada pendidikan inklusi dimadrasah menurut Umi dijelaskan melalui kategori model kurikulum reguler dan model reguler yang dikombinasi dengan proses pembelajaran individual.<sup>48</sup>

Dari kedua hal di atas ditemukan bahwa madrasah adalah salah satu lembaga yang sangat efektif untuk upaya pemerataan pendidikan dan membangun sikap dan keterampilan sosial bagi anak disabilitas. Dalam hal pemerataan, terbukti madrasah tumbuh subur justru di daerah pedesaan sehingga terjangkau oleh anak disabilitas. Sedang berkaitan dengan memupuk sikap dan keterampilan sosial didasarkan pada kenyataan bahwa madrasah lebih menyiapkan peserta didik menjadi lebih agamis dengan penanaman nilai-nilai

---

<sup>47</sup> Mukaffa, *op.cit*

<sup>48</sup> Umi Muzayanah. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Keji Ungaran Jawa Tengah*, Jurnal PENAMAS, Volume 29 Nomor 2, Juli 2016, pp 211-226

tauhid, ibadah, dan akhlak. Ketiga ajaran ini yang akan membangun keimanan dan akhlak sehingga anak disabilitas akan lebih berkembang keterampilan sosialnya. Pelaksanaan pendidikan di madrasah dapat menggunakan model pendidikan inklusi dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Inklusi penuh (kelas regular), yaitu anak disabilitas belajar bersama anak lainya (normal) sepanjang hari di kelas regular dengan kurikulum yang sama;
2. Kelas regular dengan cluster, yaitu anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus;
3. Kelas regular dengan pull out, yaitu anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus;
4. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak disabilitas belajar di dalam kelas khusus

pada sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler;

5. Kelas khusus penuh, yaitu anak disabilitas belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.<sup>49</sup>

Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak dipaksa untuk mengikuti kurikulum. Tarmansyah menjelaskan bahwa hendaknya sekolah yang harus menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki siswa.<sup>50</sup> Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Duplikasi kurikulum Siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model

---

<sup>49</sup> Direktorat Pendidikan Luar Biasa. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Dirjen Didakmen, 2004, hal. 124

<sup>50</sup> Tarmansyah. *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas, 2007, hal. 89

kurikulum ini cocok untuk siswa tunanetra, tunarungu tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni siswa tunanetra menggunakan huruf Braille, dan tunarungu, tunawicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaianya.

2. Modifikasi kurikulum Kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada siswa tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (eskalasi) untuk siswa cerdas dan berbakat (gifted and talented).
3. Substitusi kurikulum Yaitu beberapa bagian kurikulum siswa rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya.

4. Omisi kurikulum Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata.

Untuk itu perlunya sebuah perancangan yang mengatur komponen kurikulum pembelajaran pendidikan inklusi sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan jenis hambatan siswa yang diterima sekolah, berikut ini gambaran kurikulum pembelajaran:





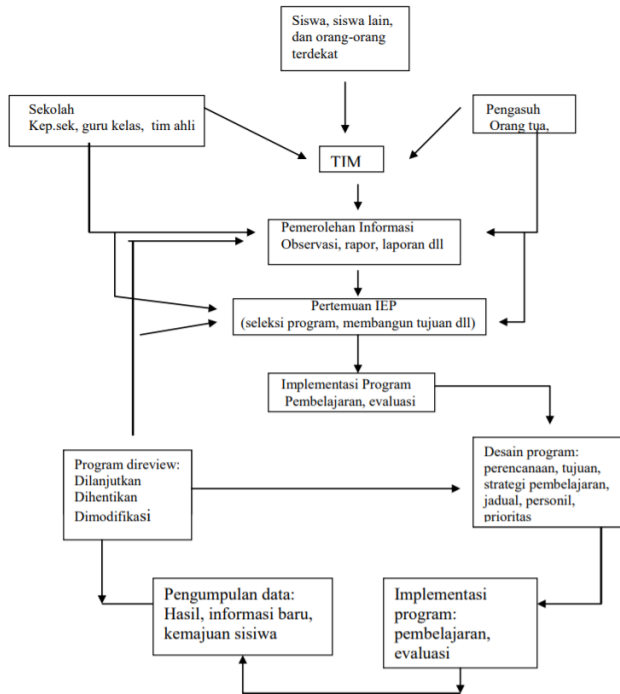
**Gambar 2.1: Rancangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Inklusi<sup>51</sup>**

Sesuai dengan kebutuhan dan asesmen terhadap siswa kemudian diterapkan kurikulum yang tentunya mampu memberikan daya dukung terhadap respon guna menghadirkan interaksi antara guru dan siswa yang

<sup>51</sup> Dirjen Pembinaan PAUD. *Penyelenggaraan PAUD Inklusif*. Jakarta: Dirjen Pembinaan PAUD Kemdikbud, 2018, hal. 28

dilakukan dengan model kurikulum baik duplikasi, modifikasi, substitusi dan omnisi.

Memahami madrasah jika disandingkan dengan pengertian inklusi yaitu madrasah yang menyelenggarakan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau mengalami hambatan dalam belajar untuk memperoleh pendidikan berkualitas bersama dengan peserta didik lainnya. Sesuai dengan ketentuan Menteri Agama, istilah madrasah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA serta MAK.

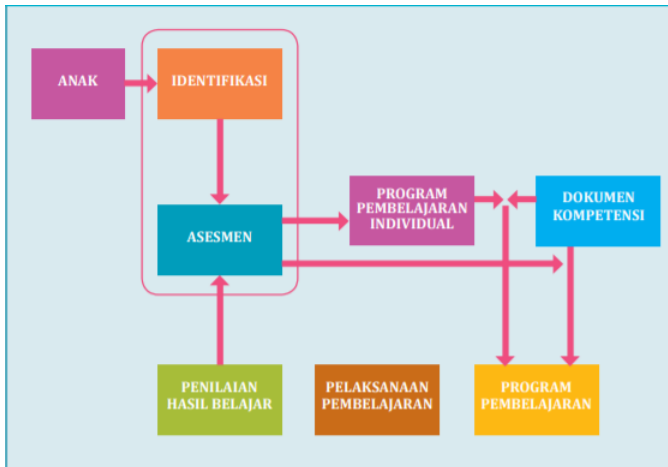


Gambar 2.2: Program Pembelajaran Individual (PPI).<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Depdiknas. *Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Khusus*, 2008, hal. 67

Mengembangkan serta modifikasi kurikulum yang berlaku secara umum, hendaknya diberlakukan terhadap peserta didik dalam kategori reguler serta peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus antara lain bagi peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus antara lain standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan peraturan menteri agama 165/2014 tentang kurikulum duaribu tiga belas dan peraturan menteri pendidikan nasional 57/2013.

Gambar 2.3: Prosedur Pembelajaran Siswa dalam Seting Inklusi<sup>53</sup>



Dapat dijelaskan bahwa pentingnya pembelajaran siswa berkebutuhan khusus atau inklusi dibutuhkan identifikasi yang bertujuan mengetahui faktor psikis dan non psikis sehingga siswa dan orang tua secara sadar mendaftarkan untuk sekolah dengan berbagai macam konsekuensi, langkah asesmen sebagai penilaian awal pada siswa dan orang tua sehingga sekolah atau

<sup>53</sup> Dirjen Pembinaan PAUD, op.cit, hal. 24

madrasah memiliki tuntunan untuk diperlakukan yang sesuai dengan kebutuhannya dengan program pembelajaran yang tersedia dan melaksanakan program, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dengan menggunakan dokumen kompetensinya.

Dari berbagai pengertian di atas tentang kurikulum dapat digarisbawahi bahwa pengembangan kurikulum pendidikan madrasah inklusi dengan melakukan penyusunan kurikulum dengan standar pendidikan nasional dengan melakukan akomodasi terhadap kemampuan akan kebutuhan, bakat kemampuan serta minat dan potensi peserta didik itu sendiri.

### **2.6.2. Model Evaluasi Kurikulum CIPP**

Secara garis besar model evaluasi kurikulum digolongkan ke dalam empat rumpun model, yaitu model pengukuran (*measurement*), penyesuaian (*congruence*), penyempurnaan (*illumination*), dan sistem evaluasi pendidikan (*educational evaluation system*). Menurut Hamid mengelompokkan berbagai model

evaluasi yaitu model evaluasi kuantitatif (Black Box Tyler, teoritik Taylor dan Maguire, pendekatan sistem Alkin, Countenance Stake dan CIPP) dan model evaluasi kualitatif (studi kasus, illuminatif dan model responsive).<sup>54</sup>

Pengertian evaluasi kurikulum di atas tentang model evaluasi kurikulum, bahwa beberapa upaya untuk mengetahui seberapa besar kurikulum yang diterapkan memberikan dampak perubahan dari sistem pembelajaran hingga hasil pembelajaran sehingga lebih mudah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran pada masa selanjutnya.

Penerapan evaluasi dapat diterapkan dalam kurikulum dengan model CIPP yaitu salah satunya (*Context, Input, Process, dan Product*), yang menjadi inti dalam paradigma model CIPP yaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan proses pendidikan. Adapun karakter peserta didik dan lingkungan yang menjadi

---

<sup>54</sup> Hamid, *op.cit*

faktor penting sebagai tujuan program dan mekanisme dalam pelaksanaan program dan prosedurnya.<sup>55</sup>

Penggunaan model CIPP dalam evaluasi yang dipelopori oleh Daniel Stufflebeam bertujuan untuk mengevaluasi penilaian terhadap pendidikan, dimana menurut Stufflebean<sup>56</sup>, adapun komponen di dalam model CIPP dengan tujuan antara lain, kontek yang melakukan evaluasi terfokus pada intuisi dengan melakukan identifikasi peluang melalui penilaian tentang kebutuhan; input dengan memfokuskan pada penentuan alternatif dengan pendekatan yang lebih tepat untuk kebutuhan identifikasi; proses yang berkaitan dengan seluruh proses dan penilaian pada pelaksanaan program, serta produk yang berkaitan terhadap penilaian hasil program yang berjalan.

Beberapa kelebihan evaluasi dengan model CIPP yaitu tidak memfokuskan pada aspek hasil termasuk

---

<sup>55</sup> Amri, S. Loeloe Endah Poerwati. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2013, hal.90

<sup>56</sup> Stufflebean, DI. *Educational Evaluation and Decision Making*. Ithaca: Peacock, 2012, hal. 146



empat yang dievaluasi. Adapun indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kontek yaitu latar belakang, riwayat, tujuan dan sasaran sekolah. Kemudian input yang mengacu pada materi dan sumberdaya manusia dengan fungsi pada sekolah secara efektif. Proses berdasar pada praktek di sekolah dengan perbedaan sarana serta akademik yang diperolehnya serta produk dengan dilandasi pada kualitas pembelajaran bagi siswa serta manfaat individu yang diraihinya dan banyak orang.<sup>57</sup>

Adapun kelebihan model CIPP mencakup proses evaluasi yang lebih baik dengan evaluasi formatif dan submatif, dimana adanya dengan keterbatasan pada implementasi dalam bidang pembelajaran dikelas dengan pelaksanaan yang kurang efektif dan tidak termodifikasi.

---

<sup>57</sup> Aziz, S., Mahmood, M., Rehman, Z. *Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study*. Journal of Education and Educational Development Volume 5, 2018 pp. 189-206

Selain itu, kekurang dalam menggunakan model CIPP antara lain minimnya informasi yang berkaitan dengan komponen dan indikator dengan menggunakan evaluasi ini sehingga tidak banyak referensi yang membahas bagaimana komponen model CIPP digunakan dalam evaluasi kurikulum. Namun banyak referensi hanya menjelaskan tujuan dan aspek yang digunakan dalam proses pengevaluasian kurikulum.

Berbagai model evaluasi yang ada model CIPP adalah model evaluasi yang memberi manfaat untuk melihat apakah program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam penerapannya implementasi kurikulum madrasah inklusi dapat memberi manfaat dengan memberikan informasi yang akuntabel dari setiap aspek yang dikaji sehingga semua pihak dapat terbantu dalam mengambil keputusan tentang kurikulum.<sup>58</sup> Untuk lebih jelasnya maksud dari masing komponen variabel CIPP dapat diuraikan antara lain:

---

<sup>58</sup> Arikunto, Suharsimi dan Safruddin Abdul Jabar, Cepi. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hal.56

evaluasi konteks (*context evaluation*) konteks yang terfokus pada formalitas pelaksanaan serta kebutuhan berdasar analisis program; evaluasi masukan (*input evaluation*) meliputi analisis kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana dalam program; evaluasi proses (*process evaluation*) mencakup bagaimana guru menyiapkan pembelajaran, siswa beraktivitas dan pelaksanaan program; serta evaluasi produk (*product evaluation*) mencakup tentang pencapaian program kurikulum.<sup>59</sup>

Model CIPP yang dibangun dalam penelitian ini yang meliputi aktivitas dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang melibatkan peran kepala sekolah, guru dan siswa sebagai pengguna dan pelaksana kurikulum itu sendiri, sehingga model CIPP salah satunya untuk mengetahui apakah pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau

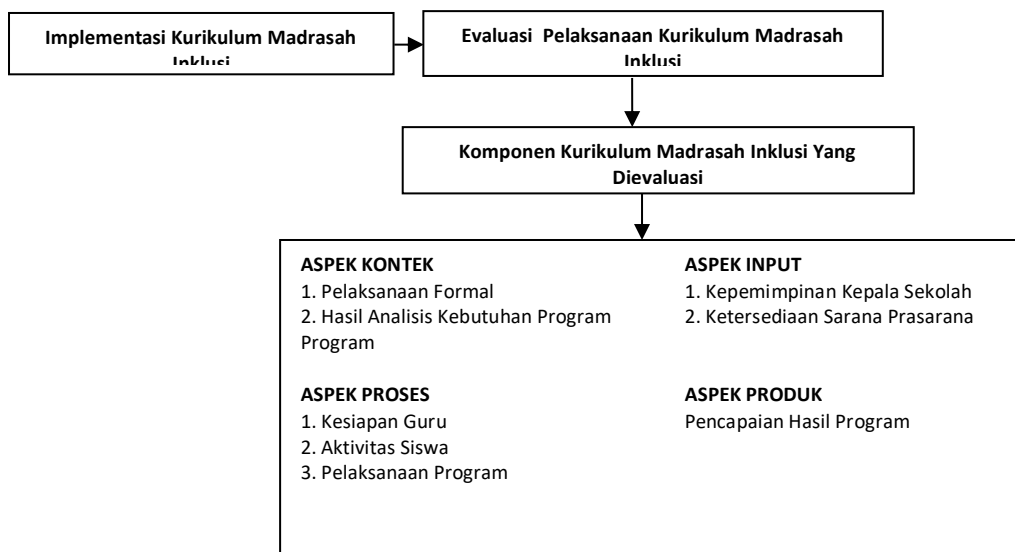
---

<sup>59</sup> Christiani, Y. *Penerapan Model CIPP Dalam Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Volume 6 Nomor 1, Mei 2018, pp.1-6

memang belum efektif dikarenakan beberapa permasalahan di lapangan.

## 2.7. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana evaluasi kurikulum ini dilaksanakan sebagai berikut kerangka teori penelitian:



Gambar 2.4: Kerangka Konseptual Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

Kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam implementasi kurikulum perlu evaluasi pelaksanaannya dengan pendekatan komponen atau aspek kurikulum yang akan dievaluasi dengan menggunakan komponen CIPP yang masuk didalamnya sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi pengguna dan pelaksana kurikulum adanya peran kepemimpinan kepala sekolah, peran guru dan orang tua siswa saling memberikan tanggapan (*respons*) sesuai dengan fungsinya.

## BAB III

### KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

#### 3.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 3.1.1. Profil MTs Yabika Kabupaten Tangerang<sup>60</sup>

Kepala Sekolah	: Dadan Mardiana, ST., M.Pd	
Alamat	: JL. Raya Perum Asabri Rt. 01/03 Ds. Kutruk, Kec. Jambe Kabupaten Tangerang	
Akreditasi	: A	
NPSN	: 20622761	
Kurikulum	: K-13	
NSM	: 20000 M2	Luas
Sumber Listrik	: PLN	Jumlah
Daya	: 6600 Kva	
Jumlah Siswa	: 295 Orang	Jumlah
Guru	: 17 Orang	

---

<sup>60</sup> MTs Yabika.  
2021.(<http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=madrasah&action=lbgs&nss=121236030060>).

Jumlah Rombel	: 9 Unit	Tempat
Ibadah	: Mushala	
Jumlah Ruang Kelas	: 12 Unit	Akses
Internet	: Tersedia	
Jumlah Laboratorium	: 2 Unit	Jumlah
Siswa Inklusi	: 13 orang	
Jumlah Perpustakaan	: 2 Unit	

#### A. Sejarah

Yayasan Pendidikan Islam Bina Insan Kamil (YABIKA) sebagai salah satu lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Jambe Kab. Tangerang Provinsi Banten yang mempunyai nilai historis yang besar, tidak bisa dipisahkan dengan Pendirinya yaitu Drs. H.M. Agus Salim, M.Pd. inilah pada Tanggal 13 Juli 2009. Drs. H.M. Agus Salim, M.Pd membangun yayasan yang kemudian lebih dikenal dengan Yayasan Pendidikan Islam Bina Insan Kamil (YABIKA) telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada

masyarakat luas baik dalam bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat.

Yayasan Pendidikan Islam Bina Insan Kamil (YABIKA) yang saat ini mengembangkan beberapa unit pendidikan formal dan non-formal, yaitu: Raudhahul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Keberadaan unit-unit pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat memberikan arti tersendiri, yaitu sebagai manifestasi nilai-nilai pengabdian dan perhatian kepada masyarakat sekitarnya. Kepercayaan dan perhatian masyarakat luas terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Islam Bina Insan Kamil (YABIKA) adalah dasar kemajuan dan perkembangan di masa depan, dengan tetap mengembangkan visi dan misi pendidikan yang mandiri serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.



## B. Motto

Cerdas Intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual

## C. Visi

Mewujudkan lulusan yang berbudi, berakhlak mulia, berbudaya cerdas dan mandiri berbasis imtaq dan berwawasan lingkungan

## D. Misi :

- 1) Membudayakan salam, senyum, sapa dalam pergaulan sehari-hari
- 2) Membudayakan pergaulan yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia tanpa membedakan status social, keadaan fisik maupun psikologis peserta didik
- 3) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
- 4) Menyelenggarakan kegiatan kesiswaan yang menjaga kelestarian alam

- 5) Mengintegrasikan pembelajaran kelestarian alam ke dalam seluruh mata pelajaran
- 6) Membina dan mengembangkan budaya local yang Islami
- 7) Menyelenggarakan pendidikan yang Islami berbasis siswa aktif, bermutu, ramah terhadap sesama dan menyenangkan
- 8) Membina dan mengembangkan life skill
- 9) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan

E. Tujuan :

- 1) Mencetak insan yang faqih, cerdas dan mandiri berlandaskan Iman dan Taqwa tanpa membedakan status social, keadaan fisik maupun psikologis peserta didik
- 2) Membangun karakter generasi yang Islami, berbudi pekerti luhur, berbudaya, ramah terhadap sesame, berakhlak mulia dan *berwawasan lingkungan*

F. Data Ketenagaan,Sarana Prasarana dan Kesiswaan  
(*Terlampir*)

G. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di MTs Yabika adalah Kurikulum 2013

Terkait dengan kegiatan inklusi, tahun pelajaran 2018/2019 siswa ABK sudah tidak ada dikarenakan siswa baru tiga tahun terakhir tidak ada yang ABK. Namun terkait pembinaan siswa yang memiliki masalah dengan sikap dan perilaku dilakukan oleh Wali Kelas dan BP/BK baik yang dilakukan insidental sesuai kebutuhan maupun kegiatan yang rutin terjadwal setiap hari sabtu dilakukan bimbingan khusus wali kelas. Adapun untuk pembinaan secara akademis dilakukan oleh guru mapel dengan dikoordinasikan oleh wakabid akademik.

H. Kegiatan Kesiswaan

Kegiatan kesiswaan meliputi :

1) Pembiasaan

- a) Sholat Dhuha dan muhadasah dilakukan setiap hari dimulai pukul 07.00 s.d 07.30
- b) Bimbingan Bacaan Al-Quran dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dilakukan pukul 07.30 s.d 08.15
- c) Upacara bendera setiap hari senin
- d) Shalat zuhur berjamaah
- e) Sholat jumat di madrasah
- f) Sewaktu ada siswa ABK dilakukan bimbingan khusus rutin seminggu 3 kali meliputi bimbingan Baca Tulis latin dan Arab, Matematika, Ibadah dan sikap.

2) Kegiatan kurikuler

Pembelajaran dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.15 s.d pukul 15.00

3) Ekstra kurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di hari Sabtu pukul 08.30 s.d 13.00 dan hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan Pembina ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada :

a) Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib

b) Ekstrakurikuler pilihan meliputi :

(1) Pencak silat

(2) Futsal

(3) Tahfiz

(4) Qiroat

(5) Marawis

(6) Marching Band

4) Bimbingan

a) Bimbingan wali kelas setiap hari Sabtu pukul  
07.30 s.d 08.30

b) Bimbingan konseling sesuai kebutuhan

### **3.1.2. Profil MTs Misbahussudur Kabupaten Serang<sup>61</sup>**

Kepala Sekolah : Mamat Rahmat, S.PdI

Alamat : Jl. Swadaya Desa Mander Kec.

Bandung Kabupaten Serang

---

<sup>61</sup> MTs Misbahussudur, 2021.  
(<http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/index.php?content=madrasah&action=lbg&nss=121236040059>).

Akreditasi	: B	
NPSN	: 60729678	
NSM	: 12236040059	
Kurikulum	: K-13	
Luas	: 2082 M2	
Sumber Listrik	: PLN	Jumlah
Daya	: 450 Kva	
Jumlah Siswa	: 107 Orang	Jumlah
Perpustakaan	: 1 Unit	
Jumlah Guru	: 12 Orang	Tempat
Ibadah	: Mushala	
Jumlah Rombel	: 4 Unit	Akses
Internet	: Tersedia	
Jumlah Ruang Kelas	: 3 Unit	Jumlah
Siswa Inklusi	: 4 orang	
Jumlah Laboratorium	: 1 Unit	

## **1. VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **A. Visi**

“Madrasah yang teguh dalam Imtaq dan berkualitas dalam Iptek serta berwawasan lingkungan “

## **B. Misi**

- Penataan institusi madrasah dan menciptakan budaya mutu.
- Optimalisasi fungsi, tugas dan tanggungjawab seluruh elemen madrasah.
- Menggerakkan siswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan menumbuhkan potensi-potensi Iptek
- Menggali, menghayati, mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Imtaq.
- Menggali dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya Islami.
- Mendorong siswa untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dalam penguasaan bahasa.
- Menumbuhkembangkan budaya berwawasan ekologis dan rasa cinta terhadap lingkungan atau

alam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **C. Tujuan**

- Tercapainya kualitas madrasah kategori unggul
- Terbentuknya sikap dan tingkah laku siswa yang agamis
- Peningkatan prestasi belajar siswa
- Menghasilkan siswa lulus 100% dalam Ujian Akhir
- Peningkatan siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- Memiliki tim kesenian yang berakar dari kebudayaan daerah dan nasional dan mampu tampil pada tingkat provinsi bahkan nasional
- Memiliki tim lomba mata pelajaran yang bisa bersaing minimal di tingkat provinsi
- Memiliki tim olah raga yang berprestasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional



- Memiliki siswa yang gemar dan mencintai lingkungan atau alam dalam kehidupannya

#### **D. Deskripsi Mutu Pendidikan**

##### **1. Guru**

- Rata-rata guru yang mengajar disekolah adalah lulusan S1 dan Ada juga yang lulusan S2
- Guru yang mengajar disekolah sangat kreatif indikatornya biasanya guru banyak menggunakan metode pembelajaran guna membuat siswa mudah untuk memahami pelajaran, contohnya seperti melakukan kegiatan praktikum langsung di lab ipa, dan computer supaya siswa mudah untuk memahami pelajaran
- Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa

- Guru rata-rata datang tepat waktu kedalam kelas untuk mengajar
- Guru mampu mengelola kelasnya dengan baik saat proses belajar berlangsung
- Guru memberikan contoh keteladanan untuk berperilaku jujur kepada peserta didik seperti tidak boleh mencontek saat mengerjakan ujian sekolah, mencontohkan untuk jujur kepada guru, orang tua dan juga teman sekolah.

## 2. Sarana prasarana

- Guru menyediakan media pembelajaran saat proses belajar mengajar berlangsung seperti menyiapkan ruang praktikum, menyiapkan laptop, infokus, dan alat-alat praktikum untuk belajar ipa. Sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang disampaikan.

- Guru menggunakan media pembelajaran sesuai materi yang diajarkan contohnya alat saat praktikum pelajaran ipa, guru menggunakan lab ipa untuk kegiatan belajar siswa, selain itu menggunakan infokus untuk menjelaskan mata pelajaran ipa.
- Sarana dan prasarana digunakan sesuai fungsinya contohnya menggunakan ruang lab untuk praktikum ipa, menggunakan meja, kursi, papan tulis, infokus, perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran dikelas.
- Alat pendidikan seperti kursi, meja, papan tulis dan lemari masih sangat layak digunakan.
- Guru memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia disekolah seperti menggunakan buku paket sebagai sumber acuan belajar, buku LKS untuk

latihan siswa, menggunakan internet sebagai sumber informasi belajar, buku-buku di perpustakaan untuk kegiatan belajar.

- Madrasah ini memiliki perpustakaan yang layak indikatornya memiliki tempat/ruangan perpustakaan sendiri, ada pengurus perpustakaannya, memiliki banyak koleksi buku, ada loker masing-masing untuk tiap koleksi buku, di dalam ruangnya ada Acnya.
- Ruangan perpustakaannya tertata rapi indikatornya terdapat buku-buku yang tersusun rapih dalam setiap rak buku, Buku ditempatkan sesuai dengan jenis buku, ada nama koleksi buku ditiap rak bukunya, ada label dan identitas ditiap bukunya.
- Madrasah memiliki buku yang lengkap indikatornya koleksi bukunya lebih dari

1 buku, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

3. Proses belajar mengajar

- Guru menggunakan RPP saat di dalam kelas
- Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan saat pembelajaran berlangsung
- Guru menggunakan LKS sebagai bahan ajar untuk proses belajar mengajar
- Guru menggunakan metode pembelajaran secara kreatif dan menarik
- Saat menggunakan metode diskusi pada kegiatan pembelajaran guru menggunakan metode tambahan
- Dalam proses belajar mengajar guru menggunakan teknologi informasi seperti komputer
- Dalam proses belajar mengajar guru menggunakan alat peraga untuk

menyampaikan materi kepada peserta didik

- Setelah proses belajar mengajar berakhir guru melakukan penilaian dan evaluasi pelajaran yang diterima

#### 4. Penghargaan atas prestasi

- Setiap siswa yang berprestasi mendapatkan penghargaan berupa reward secara langsung dari kepala sekolah, staff dan para guru baik berupa materil dan non materil.
- Prestasi yang didapatkan oleh siswa biasanya dipajang diruangan kepala sekolah dan diruang loby indikatornya seperti terdapat banyak koleksi piala hasil prestasi siswa, piagam penghargaan dan bentuk penghargaan yang lainnya.
- Setiap prestasi yang didapatkan oleh siswa mendapatkan bantuan dana pendidikan baik dari pihak sekolah

secara langsung maupun dari sponsor yang mendukung kegiatan siswa.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Temuan

##### 4.1.1. MTs Yabika Kabupaten Tangerang

1. Kesiapan madrasah menyelenggarakan Madrasah Inklusi
  - a. Kekuatan
    - 1) Surat Keputusan Penetapan MTs Yabika dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai madrasah Inklusi
    - 2) Dukungan yayasan terhadap pendidikan inklusi
    - 3) Kesiapan guru menyelenggarakan madrasah inklusi
    - 4) Pernah mendapatkan pelatihan madrasah inklusi
  - b. Kelemahan
    - 1) Kurangnya pembinaan terkait madrasah inklusi dari kemenag



- 2) Fasilitas inklusi masih kurang
- 3) Kurangnya pembinaan guru pembimbing khusus
- 4) Tidak setiap tahun ada siswa anak berkebutuhan khusus yang mendaftar sebagai siswa baru

c. Peluang

Karena sudah diberikan surat keputusan sebagai madrasah inklusi dan pernah mendapatkan pelatihan maka madrasah siap menyelenggarakan kegiatan inklusi di madrasah

d. Tantangan madrasah

- 1) Tidak setiap tahun ada siswa anak berkebutuhan khusus
- 2) Belum memiliki guru yang profesional menangani peserta didik anak berkebutuhan khusus

2. Perumusan Tujuan Satuan Pendidikan :

MTs Yabika setiap tahun mencoba meninjau kembali Visi, Misi dan Tujuan satuan pendidikan

sesuai dengan dinamika yang berkembang. Saat ini selain tujuan pendidikan mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus, juga sedang berupaya mewujudkan sekolah adiwiyata dan ramah anak.

3. Identifikasi dan assessment peserta didik
  - a. Di awal tahun 2015 kami menyelenggarakan identifikasi dan assessment terhadap peserta didik yang difasilitasi Madrasah Development Center (MDC) dengan mendatangkan Psikolog dari UNTIRTA. Namun seiring dengan tiga tahun terakhir tidak ada siswa ABK kami hanya mengidentifikasi saat awal pendaftaran dengan mewawancarai orang tua/wali terkait kondisi siswa baru.
  - b. Saat pendaftaran siswa baru
  - c. Panitia PPDB dan Kesiswaan
  - d. Awal tahun 2015 terdapat 13 siswa Untuk tahun pelajaran 2018-2019 tidak ada karena sudah

lulus dan ada 3 siswa yang melanjutkan ke MA Yabika

4. Untuk memberikan layanan peserta didik ABK MTs Yabika memodifikasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa namun karena dari 13 siswa anak berkebutuhan khusus hanya satu yang memang secara kemampuan maupun perilaku butuh penanganan khusus maka standar kompetensi mapel diturunkan sesuai dengan kemampuan siswa sedangkan 12 siswa lainnya mengikuti kurikulum reguler dan guru mapel menyesuaikan kondisi dan situasi belajar siswa.
5. Terkait penilaian untuk 12 siswa dilakukan penilain sama seperti siswa reguler, sedangkan untuk 1 siswa guru mapel membuat soal khusus sesuai dengan kemampuan siswa. Hanya saja kami masih belum memiliki raport khusus dan Ijazah khusus siswa inklusi. Saat ini kami masih menggunakan raport dan ijazah sama dengan siswa reguler.
6. Sarana dan prasarana

- a. Siswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan penggunaan kursi roda kami sudah menyiapkan akses bidang miring dan selasar antar ruang serta kamar mandi dengan closet duduk dan pegangan tangan
- b. Untuk anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan penggunaan kursi roda disiapkan pula kursi roda dan halaman dan area kantin yang sudah dipavingblock sehingga kegiatan bermain maupun beristirahat siswa berkebutuhan khusus tidak mengalami kesulitan
- c. Untuk ruang kelas lantai satu sudah dilengkapi dengan bidang miring dan selasar antar ruang namun lantai dua dan tiga belum memiliki akses. Sehingga penempatan siswa berkebutuhan khusus kita tempatkan di kelas yang berada di lantai satu.

## 7. Pelaksanaan pembelajaran

Saat ini mengingat tidak ada siswa berkebutuhan khusus maka tidak ada bimbingan khusus anak berkebutuhan khusus, namun karena tiga siswa berkebutuhan khusus melanjutkan ke MA Yabika maka pembinaan dilanjutkan di MA Yabika

8. Inovasi Manajemen
  - a. Kepemimpinan
  - b. Tata kelola
  - c. Budaya madrasah
  - d. Jaringan kerja sama, internal dan eksternal
9. Output peserta didik jika dibandingkan dengan peserta didik normal :  
Prestasi akademik dan non akademik
  - 1) Siswa atas nama Taskia memiliki kendala penglihatan dan kurang percaya diri, namun setelah mendapatkan bimbingan mengalami perubahan percaya diri dan mampu mengikuti pembelajaran lebih baik bahkan bisa masuk 3 besar di kelasnya dan aktif dalam kegiatan OSIS

2) Riko Nawila saat masuk dengan kondisi kaki tidak bisa berjalan normal sering mendapatkan ejekan dari teman atau siswa MI yang membuat emosi dia meledak-ledak bahkan seperti orang kesurupan. Namun berkat bimbingan yang intensif baik kepada Riko maupun peserta didik yang lain kini Riko nyaman belajar dan tidak lagi mendapatkan ejekan dan justru mendapatkan bantuan dari teman-temannya ketika Riko membutuhkan bantuan bahkan Riko bisa masuk ranking 10 besar di kelasnya dan memiliki kemampuan bermain gitar yang baik, bahkan sering tampil dalam acara-acara yang diselenggarakan madrasah.

3) Adapun untuk siswa yang lain meskipun prestasi akademiknya belum optimal namun dengan berbagai upaya guru mapel siswa yang bersangkutan mampu mencapai nilai standar minimal.

10. Yang terlibat dalam pembinaan inklusi :

- a. Yayasan dengan support anggaran maupun semangat untuk menjalankan pendidikan inklusi
  - b. Dewan guru yang senantiasa sabar membimbing sesuai dengan mapel masing-masing
  - c. Guru pembimbing khusus untuk menangani ananda Dekri Waldan terdiri dari :
    - 1) Ibu Maryupianti, SPd sebagai pembimbing matematika
    - 2) Ibu Rika Febrianti, S.Pd sebagai pembimbing bahasa
    - 3) Bapak Ust. Ahmad Fauzi, S.Pd.I sebagai pembimbing ibadah dan akhlak
11. Kelemahan kami justru tidak ada pengawasan dari unsur terkait sehingga pelaksanaan madrasah inklusi diselenggarakan dengan pemahaman madrasah sendiri sehingga terkesan stagnan.
12. Mengingat miskinnya pengawasan maka berakibat pada lemahnya evaluasi terlebih saat ini tidak ada

siswa berkebutuhan khusus sehingga nyaris pembinaan inklusi terabaikan.

13. Kepala madrasah selaku ujung tombak pelaksanaan madrasah inklusi sangat membutuhkan regulasi yang jelas dari kementrian agama sehingga pelaksanaan madrasah inklusi benar-benar dapat berjalan optimal. Sementara kemitraan dengan Dinas Pendidikan yang nota bene telah memiliki sekolah inklusi yang sudah berjalan lebih baik belum terjembatani. Sehingga madrasah inklusi sulit berkembang.

Saat ini pengawasan dari pengawas di kemenag pun belum menyentuh penyelenggaraan madrasah inklusi bahkan terkadang ada yang belum memahami bagaimana pengelolaan madrasah inklusi. Sebagai contoh kami memiliki satu orang siswa yang secara kemampuan belajar jauh dari standar minimal bahkan kompetensinya harus diturunkan levelnya sampai kembali ke level MI, namun karena yang bersangkutan masuk ke MTs



dengan membawa ijazah SD maka dengan segala keterbatasannya kami tetap berusaha untuk menerima. Namun manakala kita akan melakukan penilaian kita kesulitan menggunakan jenis raport dan ijazah yang seperti apa? Yang pada akhirnya kita gunakan raport maupun ijazah regular.

Saat ini siswa tersebut melanjutkan ke madrasah aliyah yang kami selenggarakan kesulitan yang sama pun dirasakan oleh madrasah aliyah. Mohon solusi dan bimbingan dari Kementrian Agama

14. Tahapan Implementasi Penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah.

Sejujurnya kami sampaikan penyelenggaraan madrasah inklusi di madrasah kami nyaris hanya berjalan terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan akhir tahun pelajaran 2017/2018 dengan kemampuan dan keterbatasan yang kami miliki sesuai dengan pelatihan yang pernah kami terima dari MDC melalui bantuan Australia. Selama itu pula selepas proyek pembinaan selesai nyaris tidak

ada lagi pembinaan lanjutan madrasah inklusi dari kementrian agama sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk tahun ini tidak berjalan di MTs Yabika dan pelaksanaan berpindah ke MA Yabika karena 3 orang siswa berkebutuhan khusus kami melanjutkan ke MA Yabika.



Tabel 4.1. Data Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2015 (Ploting Madrasah Inlusi)

No	Nama	Usia	Kelas	Hambatan	Motivasi	Kelebihan	Kesukaan	Tidak Suka	Bantuan
1	Andhika	13 Tahun	7a	Lamban Belajar	Menjadi Anak Pintar	Menggambar	Bermain Sepak Bola Menonton TV Nasi Goreng Jengkol	Belajar IPS, MTK Bermain dengan perempuan	Kadang-Kadang

2	Abdano At-Tila Duta R.	13 Tahun	8c	Kesulitan Membaca Huruf Arab	Menjadi Anak Pintar	Menggam bar	Berolahra ga Main Game Nasi Goreng	Makana n Pahit Sayuran	Jarang
3	Bias Maulidya Azhary	13 Tahun	8B	Emosi Diri Meledak- Ledak	Menjadi Anak Sukses	Bernyanyi	Berolahra ga Bakso Mie Ayam	Membac a Teman Suka Meledak Cap Cay	Jarang

4	Dandi	14 Tahun	9C	Lamban Belajar	Mendapatkan Ilmu Pengetahuan	Berolahraga	Makan Mie, Oncom, Jengkol Main Sepak Bola	Diomelin Guru dan Orang Tua Dijaili teman	Kadang-Kadang
5	Dekri Waldan	15 Tahun	7A	Emosi Meledak-ledak & Sulit Belajar	Menjadi Anak Pintar	Berolahraga	Menggambar	Belajar	Kadang-Kadang

							Main Kompute r		
6	Fikri Haikal	13 Tahun	7C	Susah Berfikir	Ingin pintar Ingin mempunyai pengalama n yang baik Ingin membangg	Mengaji Bermain Bola	Membaca Berhitung Olahraga	Sayuran Makana n Pahit	Jarang

					akan kedua orang tua				
7	Irfan Maulana	14 Tahun	8C	Kesulitan Membaca Bahasa Arab	Menjadi Anak Pintar	Mengaji Berolahraga	Membaca & Berhitung Berolah Raga	Sayuran Makana n Pahit	Jarang
8	M. Fikri Saputra	14 Tahun	9C	Lamban Membaca	Mencari Ilmu Di sekolah Karena Orang Tua	Sepak Bola Bola Voly	Sepak Bola Makan Mie	Dihuku m Bolos Ribut	Kadang- Kadang



					Padahal Saya Tidak Semangat Untuk Sekolah		Ayam Mengaji		
9	Palimo Prayoga	14 Tahun	8C	Penglihatan	Menjadi Anak Pintar	Bulu Tangkis	Baca Komik Bakso, Mie, Ikan dan Ayam Goreng	Berhitun g Jengkol	Sering

10	Rico Nawila	14 Tahun	9B	Kaki	Menjadi Anak Pintar	Bermain Musik (Gitar & Drum set)	Marawis Nasi Goreng	Sayuran	Jarang
11	Sepi Saprudin	13 Tahun	7B	Emosi diri meledak-ledak	Menjadi Anak Pintar	Menggam bar	Menggam bar	Teman yang Meledak	Kadang- Kadang
12	Syifa Faizatul Hasanah	13 Tahun	7A	Penglihatan	Menjadi Anak Pintar	Bernyanyi	Marching Band Nasi Goreng	Makan Ikan	Kadang- Kadang

13	Tazkia Fahma Nia Aila	13 Tahun	8C	Kesulitan Melihat Jarak Jauh	Menjadi Anak Pintar	Membuat puisi Bermain Badminton	Membaca Berhitung Belajar Bahasa Asing Komik	Ruang Kotor Makana n Pedas	Jarang
----	-----------------------------	----------	----	------------------------------------	---------------------------	--	---	-------------------------------------	--------

1 Tabel. 4.2. Hasil Wawancara di MTs Yabika

2

NO	INFORMAN	EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM INKLUSI
1	Kepala Madrasah (DD)	<p>1. Bagaimana madrasah menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Sesuai dengan pedoman dan assessment program pendampingan anak berkebutuhan khusus maka langkah awal dilakukan screening calon siswa dan anak oleh koordinator program yang meliputi wakil kurikulum guru kelas dan guru pendamping kemudian dilakukan plotting penerapan kurikulum inklusi.”</p> <p>2. Apakah pelaksanaan kurikulum inklusi secara formal telah berjalan sesuai panduan?</p> <p>“Pada arahan pelaksanaan kurikulum inklusi secara formal telah terlaksana di MTs Yabika sejak tahun 2015 namun kami mengakui masih banyak dalam pelaksanaannya”</p>

		<p>3. Bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum inklusi telah ada beberapa guru yang dilatih dan telah melaksanakan tugasnya cukup baik sesuai dengan tindaklanjut pelatihan tersebut.”</p> <p>4. Bagaimana aktivitas siswa ABK sejak penerimaan hingga selesai dalam satu tahun atau yang lulus MTs?</p> <p>“Aktivitas siswa berkebutuhan khusus mulai dari penerimaan, assessment, pembelajaran, pendampingan, konsultasi kepada orang tua, Alhamdulillah berjalan cukup baik walaupun di tahun pertama perlu meyakinkan semua pihak guru, orangtua dan siswa lainnya secara bersama melaksanakan program ini.”</p> <p>5. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kurikulum inklusi sudah cukup?</p> <p>“Untuk saat ini sarana dan prasana untuk pelaksanaan kurikulum inklusi telah disediakan</p>
--	--	---

		<p>walaupun belum secara keseluruhan namun cukup untuk membantu guru dan siswa dalam pembelajaran.”</p> <p>6. Apakah pelaksanaan program kurikulum inklusi telah memberikan kepercayaan bagi siswa dan orangtuanya?</p> <p>“Banyak orang tua berpendapat sejak anaknya bersekolah di MTs Yabika melalui kurikulum inklusi mendapat perhatian dan respon yang baik dimana anak memiliki tanggungjawab dan kepercayaan untuk belajar dan berinteraksi di sekolah dan dilingkungan keluarga.”</p> <p>7. Apakah kendala yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kami mengakui masih banyaknya keterbatasan yang kami miliki antara lain kurangnya guru yang terlatih, sarana prasarana yang perlu ditingkatkan serta dukungan orang tua yang lebih ditingkatkan serta kurangnya pembinaan dari kemenang akan pelaksanaan kurikulum inklusi.”</p>
--	--	--

2	akakurikulum/ Koordinator Inklusi (NV)	<p>1. Bagaimana memenuhi kebutuhan program kurikulum inklusi?</p> <p>“Kebutuhan program kurikulum terpenuhi melalui pemerintah dan komite madrasah, namun belum semua tersedia walaupun sudah cukup untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.”</p> <p>2. Apakah kurikulum yang ada telah dilaksanakan secara formal untuk pendidikan inklusi?</p> <p>“Telah dilaksanakan dengan kurikulum duplikasi dan modifikasi dengan mengacu pada kurikulum 2013 melalui disain PPI, silabus dan RPP.”</p> <p>3. Bagaimana guru mempersiapkan dalam melaksanakan kurikulum inklusi?</p> <p>“Guru kelas dan guru pendamping mempersiapkan kurikulum PPI, silabus dan RPP yang dimodifikasi sesuai dengan hambatan masing-masing siswa berkebutuhan khusus.”</p> <p>4. Bagaimana menilai kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p>
---	--	---

		<p>“Kepala Madrasah memberikan dukungan penuh baik motivasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum inklusi ini karena sebagai amanah yang harus dilaksanakan.”</p> <p>5. Bagaimana sarana dan prasana yang ada mendukung pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Dalam pembelajaran siswa cukup terpenuhi sehingga memberikan motivasi bagi siswa berkebutuhan khusus untuk belajar.”</p> <p>6. Apakah aktivitas siswa ABK dalam pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum inklusi?</p> <p>“Saya berusaha sesuai dengan pedoman yang ada terutama pada kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan hambatan siswa.”</p> <p>7. Apakah pelaksanaan program kurikulum inklusi sesuai dengan harapan guru dan orang tua siswa?</p> <p>“Selama program yang berjalan di MTs Yabika kurikulum inklusi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan orantua dan juga guru.”</p>
--	--	---



3	Guru Kelas (MY)	<p>1. Apakah yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Guru kelas membantu siswa berkebutuhan khusus untuk termotivasi mengikuti pembelajaran sedangkan guru pendamping atau pembimbing memberikan stimulant pada pelajaran yang disenanginya.”</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kendala yang dihadapi belum adanya kurikulum yang baku yang ditetapkan dimadrasah masih berupa kurikulum modifikasi dan adopsi walaupun dilanjutkan dengan desain PPI, silabus dan RPP, dukungan orang tua yang masih rendah dan kurangnya fasilitas yang tersedia”.</p>
4	Orang Tua Siswa (SK/DA)	<p>1. Apakah pelaksanaan kurikulum inklusi secara formal sudah berjalan baik?</p> <p>“Saya yakin guru di MTs Yabika melaksanakan kurikulum inklusi bagi anak berkebutuhan khusus secara formal sudah baik”.</p>

		<p>2. Bagaimana madrasah mempersiapkan kebutuhan siswa ABK dalam program kurikulum inklusi?</p> <p>“Saya melihat MTs Yabika telah mempersiapkan pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhannya karena dilakukan penerimaan dan penilaian.”</p> <p>3. Apakah guru telah menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan program kurikulum inklusi?</p> <p>“Ya menunjukkan kesiapannya baik dari guru kelas, guru pembimbing dan sarana pembelajaran.”</p> <p>4. Bagaimana menilai kepala madrasah dalam mempersiapkan pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kepala madrasah mengundang orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk berkonsultasi dan mengevaluasi perkembangan siswa.”</p> <p>5. Apakah aktivitas siswa di madrasah memberikan perubahan?</p> <p>“Saya bersyukur dengan anak saya bersekolah di MTs Yabika sudah banyak belajar berinteraksi dengan teman lainnya dan belajar menggunakan sarana</p>
--	--	--

		pembelajaran yang disediakan serta menambah kepercayaan dilingkungannya.”
--	--	---

3

4

5 **4.1.2. MTs Misbahussudur Kabupaten Sera**

1  
2

1

Tabel 4.3. Data Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019

NO	NAMA	USIA	KELAS	HAMBATAN	MOTIVASI	KELEBIHAN	KESUKAAN	TIDAK SUKA	BANTUAN
1	Andri	13 Tahun	7	Emosi Diri	Menjadi Anak Pintar	Menggambar	Bermain Bola Menonton TV Nasi Goreng Bakso	Belajar Berhitung Sayuran	Jarang
2	Anaja	14 Tahun	8	Kesulitan Belajar	Menjadi Anak Pintar	Menggambar	Berolahraga Main HP Makan Gorengan	Makanan Pahit Sayuran	Jarang

3	M. Padilah	15 Tahun	9	Bibir Sumbing	Menjadi Anak Sukses	Bernyanyi	Berolahraga Bakso Mie Ayam	Membaca Teman Suka Meledak Sayuran	Jarang
4	M. Fahri	15 Tahun	9	Berbicara dan Pendengaran	Menjadi Anak Baik	Menggambar	Berolahraga Membaca Makanan Ringan	Olahraga Teman Meledak Makanan Pedas	Kadang- Kadang

2

1 Tabel. 4.4. Hasil Wawancara di MTs Misbahussudur

NO	INFORMAN	EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM INKLUSI
1	Kepala Madrasah (MR)	<p>1. Bagaimana madrasah menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kebutuhan pelaksanaan kurikulum inklusi dilakukan oleh tim kurikulum dan guru kelas beserta siswa dan orangtua tentang hambatan yang dihadapi.”</p> <p>2. Apakah pelaksanaan kurikulum inklusi secara formal telah berjalan sesuai panduan?</p> <p>“Dalam melaksanakan kurikulum inklusi belum sepenuhnya dilaksanakan secara formal karena keterbatasan guru dan sarana pembelajaran.”</p> <p>3. Bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum inklusi?</p> <p>“Kesiapan guru untuk pembelajaran namun belum adanya guru yang terlatih untuk program kurikulum inklusi ini.</p>

		<p>4. Bagaimana aktivitas siswa ABK sejak penerimaan hingga selesai dalam satu tahun atau yang lulus MTs?</p> <p>“Dalam perkembangan siswa berkebutuhan khusus sejak diterima hingga lulus berjalan sebagaimana biasa walaupun beradaptasi diawal memakan waktu di madrasah dan lulus sebagaimana mestinya.”</p> <p>5. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kurikulum inklusi sudah cukup?</p> <p>“Masih minimnya sarana prasarana yang ada untuk pelaksanaan kurikulum inklusi di madrasah kami.”</p> <p>6. Apakah pelaksanaan program kurikulum inklusi telah memberikan kepercayaan bagi siswa dan orangtuanya?</p> <p>“Orangtua siswa memberikan kepercayaan penuh kepada kami namun banyak keterbatasan yang kami miliki tentunya kami berikan sesuai dengan kemampuan yang ada.”</p>
--	--	--



		<p>7. Apakah kendala yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Tidak adanya guru yang terlatih untuk kurikulum inklusi dan sarana prasarana pembelajaran yang mendukung serta dukungan orang tua yang minim”</p>
2	<p>koordinator Inklusi (BQ)</p>	<p>1. Bagaimana memenuhi kebutuhan program kurikulum inklusi?</p> <p>“Didapatkan dari BOS dan komite madrasah”</p> <p>2. Apakah kurikulum yang ada telah dilaksanakan secara formal untuk pendidikan inklusi?</p> <p>“Kami menjalankan kurikulum inklusi sesuai dengan kebutuhan siswa dengan hambatan tertentu”</p> <p>3. Bagaimana guru mempersiapkan dalam melaksanakan kurikulum inklusi?</p> <p>“Guru mempersiapkan pembelajaran melalui silabus dan RPP disertai dengan modifikasi kurikulum 2013”</p> <p>4. Bagaimana menilai kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p>

		<p>“Kepala Madrasah melakukan komunikasi kepada orang tua siswa dan komite madrasah untuk mencari dukungan sarana dan pelatihan guru untuk pelaksanaan kurikulum inklusi”</p> <p>5. Bagaimana sarana dan prasana yang ada mendukung pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Belum adanya sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kurikulum inklusi di MTs kami”</p> <p>6. Apakah aktivitas siswa ABK dalam pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum inklusi?</p> <p>“Aktivitas pembelaran siswa berkebutuhan khusus diarahkan sesuai dengan RPP dan silabus yang disusun guru”</p> <p>7. Apakah pelaksanaan program kurikulum inklusi sesuai dengan harapan guru dan orang tua siswa?</p> <p>“Harapan orangtua kepada madrasah kami sangat besar walaupun dalam pelaksanaan kurikulum inklusi banyak kekurangan yang kami hadapi”</p>
3	uru Kelas (MT)	<p>1. Apakah yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p>

		<p>“Dalam melaksanakan kurikulum inklusi guru menyiapkan RPP dan silabus yang ada dan disesuaikan dengan hambatan siswa berkebutuhan khusus”</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum inklusi?</p> <p>“Siswa berkebutuhan khusus tidak semua mata pelajaran sanggup mengikuti, tidak adanya guru terlatih serta sarana prasarana pembelajaran yang mendukung”</p>
4	orang Tua Siswa (MF/MF)	<p>1. Apakah pelaksanaan kurikulum inklusi secara formal sudah berjalan baik?</p> <p>“Menurut saya sudah berjalan namun masih kurang sarana prasarana pembelajaran”</p> <p>2. Bagaimana madrasah mempersiapkan kebutuhan siswa ABK dalam program kurikulum inklusi?</p> <p>“Madrasah mempersiapkan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dengan BOS dan Komite Madrasah”</p>

		<p>3. Apakah guru telah menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan program kurikulum inklusi?  “Yang saya lihat sudah siap namun belum terlatih”</p> <p>4. Bagaimana menilai kepala madrasah dalam mempersiapkan pelaksanaan kurikulum inklusi?  “Kepala Madrasah menyampaikan perkembangan siswa berkebutuhan siswa dari guru dan juga orang tua siswa”</p> <p>5. Apakah aktivitas siswa di madrasah memberikan perubahan?  “Anak saya dengan bersekolah di MTs memiliki interaksi yang semakin baik dan juga kepercayaan dirinya”</p>
--	--	---

## 4.2. Pembahasan

Madrasah adalah salah satu lembaga yang sangat efektif untuk upaya pemerataan pendidikan dan membangun sikap dan keterampilan sosial bagi anak disabilitas. Dalam hal pemerataan, terbukti madrasah tumbuh subur justru di daerah pedesaan sehingga

terjangkau oleh anak disabilitas. Sedang berkaitan dengan memupuk sikap dan keterampilan sosial didasarkan pada kenyataan bahwa madrasah lebih menyiapkan peserta didik menjadi lebih agamis dengan penanaman nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak. Ketiga ajaran ini yang akan membangun keimanan dan akhlak sehingga anak disabilitas akan lebih berkembang keterampilan sosialnya.

Penyadaran agama bagi siswa menjadi kunci utama pendidikan di madrasah, karena madrasah dibangun dari misi untuk mendidik generasi berdasarkan pada ajaran agama Islam agar siswa menjadi insan yang beriman dan berakhlakul karimah. Dengan akhlak yang baik ini akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang tidak memandang seseorang dari sisi penampilan fisiknya namun lebih memandang aspek kemanusiaanya. Dengan demikian madrasah lebih bisa memahami dan menerima keragaman siswa disabilitas dengan menumbuhkembangkan keimanan dan amal sholeh. Secara empiris sebenarnya madrasah dari awal

sudah menerapkan keragaman siswa dalam belajar, yaitu menerima siswa disabilitas untuk dididik dalam kelas biasa namun sifatnya hanya memberi bantuan pada mereka agar bisa sekolah tanpa memberi label sekolah inklusi.

Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dianut masing-masing madrasah tentunya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan siswa berkebutuhan khusus sehingga adanya kurikulum yang disiapkan baik modifikasi dari kurikulum yang ada dan kemudian disiapkan silabus dan RPP oleh guru masing-masing.

Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah, namun pendidikan inklusi dengan keterbatasan yang ada pemerintah menyetarakan semua peserta didik berkebutuhan khusus baik tingkat SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA hal ini tidak membedakan antara kelas inklusi dan reguler. Konsekuensinya ketika siswa berkebutuhan khusus berkompetensi dengan siswa reguler tentunya dengan kompetensi tertentu sehingga secara umum terutama pada pangsa pasar kerja tidak semua siswa berkebutuhan khusus mendapat tempat sesuai dengan kompetensinya.

Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Banyak masalah ataupun kendala yang ditemui pelaksanaan program inklusi antara lain: sistem assessment program inklusi yang belum baku, kurikulum inklusi yang belum terumuskan, kurikulum yang peka dan mau menyesuaikan diri dengan anak berkebutuhan khusus, yang mampu memfasilitasi pengembangan potensi dan kecerdasan setiap anak

termasuk anak berkebutuhan khusus (perlu diingat bahwa setiap anak adalah cerdas di potensinya masing-masing), sumber daya pendidik belum tersedia secara memadai, baik kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pengajaran pada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, dan kebijakan yang belum maksimal, masih terbatasnya dukungan dana dari pemerintah untuk pengembangan pendidikan inklusi.

#### **4.2.1. Pelaksanaan Belajar Madarasah Inklusi**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Menegaskan bahwa negara memberikan jaminan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan kesempatan sama dengan anak lainnya dalam bidang pendidikan. Negara menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusi pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah. Secara



tegas dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh negara. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia.

Memperhatikan landasan hukum tersebut seharusnya tidak ada alasan penyelenggaraan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi kurang berjalan dengan baik atau kurang sarana prasarannya; sebagaimana terjadi di dua lembaga pendidikan MTs Yabika dan MTs Misbahussudur. Alasan idiologis bahwa pendidikan itu wajib diselenggarakan umat, namun tidak cukup alasannya. Karena yang tanggung jawab terhadap pendidikan itu selain masyarakat juga pemerintah; Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Gubernur Banten 70/2014 yang menguraikan panduan pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Hal tersebut menjadi pijakan penting bagi terwujudnya terobosan dalam pelayanan pendidikan terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan madrasah inklusi di provinsi Banten. Hal ini Instrumen kebijakan keberadaan pemerintah kepedulian pemerintah atas komunitas berkebutuhan khusus diantaranya undang-undang 19/2011 menjelaskan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, kemudian peraturan Menteri Agama 90/2013 yang mengatur tentang pendidikan madrasah sebagai landasan daya dukung penyelenggaraan pendidikan inklusi harus berjalan dengan baik.

#### **4.2.2. Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Inklusi**

Mengembangkan serta modifikasi kurikulum yang berlaku secara umum, hendaknya diberlakukan terhadap peserta didik dalam kategori reguler serta peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus antara

lain bagi peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus antara lain standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan peraturan menteri agama 165/2014 tentang kurikulum duaribu tiga belas dan peraturan menteri pendidikan nasional 57/2013.

Pengembangan konsep efektivitas kurikulum, dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan untuk memaksimalkan efektivitas mengajar dan belajar di sekolah melalui perubahan kurikulum sebagai berikut:

1. Pendekatan Perubahan Kurikulum Simplistik.

Kurikulum dapat dikembangkan atau diubah secara simplistik pada level individu siswa, program, atau level sekolah. Perubahan ini dapat disesuaikan dengan kondisi level tersebut dengan berpedoman pada kompetensi guru dan karakteristik siswa sebagai dasar untuk mencapai tujuan sekolah. Pendekatan ini berasumsi bahwa guru adalah pasif, kompetensi guru adalah statis,

dan perubahan kurikulum dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif oleh pengelola sekolah atau tenaga ahli dari luar sekolah.

2. Pendekatan pengembangan kompetensi Guru. Kompetensi Guru dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan kurikulum dibebankan oleh pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar. Kompetensi guru dapat dikembangkan secara mudah untuk memuaskan semua kebutuhan dan kurikulum sekolah.
3. Pendekatan Perubahan Kurikulum Dinamis. Kedua pendekatan kurikulum (simplistik dan kompetensi guru) dapat dikembangkan dan diubah secara aktif dan dinamis dengan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan kurikulum melalui fasilitas pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berasumsi bahwa: efektivitas kurikulum adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan siklus keberlanjutan

dan proses perubahan kurikulum dan kompetensi guru; kurikulum adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan siklus keberlanjutan dan proses perubahan kurikulum dan kompetensi guru; kurikulum dapat dikembangkan dan diubah secara efektif ketika guru (yang menerapkan) selalu dilibatkan dalam proses; kompetensi guru dapat dikembangkan tidak hanya untuk memuaskan pada tuntutan kurikulum yang ada atau kurikulum yang diubah melainkan juga untuk mengembangkan kurikulum yang lebih tepat untuk menyesuaikan karakteristik siswa, tujuan sekolah, dan kondisi sekolah; dan perubahan efektivitas kurikulum dapat dilibatkan tidak hanya pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar tetapi juga guru-guru untuk membantu dalam menyusun perencanaan kurikulum dan pembuatan keputusan.

Pengembangan kurikulum pendidikan madrasah inklusi dengan melakukan penyusunan kurikulum dengan standar pendidikan nasional dengan melakukan akomodasi terhadap kemampuan akan kebutuhan, bakat kemampuan serta minat dan potensi peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan kurikulum di madrasah inklusi yaitu MTs Yabika dan MTs Misbahussudur keduanya menggunakan desain kurikulum modifikasi dari kurikulum 2013, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mukaffa dkk (2017), dimana di MTs Yabika dalam memberikan layanan peserta didik memodifikasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa namun karena dari 13 siswa anak berkebutuhan khusus hanya satu yang memang secara kemampuan maupun perilaku butuh penanganan khusus maka standar kompetensi mapel diturunkan sesuai dengan kemampuan siswa sedangkan 12 siswa lainnya mengikuti kurikulum reguler dan guru mapel menyesuaikan kondisi dan situasi belajar siswa. Terkait penilaian untuk 12 siswa dilakukan penilain

sama seperti siswa reguler, sedangkan untuk 1 siswa guru mapel membuat soal khusus sesuai dengan kemampuan siswa. Hanya masih belum memiliki raport khusus dan Ijazah khusus siswa inklusi. Saat ini kami masih menggunakan raport dan ijazah sama dengan siswa reguler.

Sedangkan di MTs Misbahussudur dalam melaksanakan kurikulum inklusi menggunakan silabus dan RPP dengan jumlah siswa yang digabungkan dengan kelas reguler namun dalam penilaian dibawah standar karena hambatan atau keterbatasannya, hal ijazah diberlakukan sama dengan dengan reguler yang artinya tidak ada perbedaan antara lulus kelas regular dengan kelas inklusi. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan siswa berkebutuhan khusus secara formal di kelas namun bagi siswa yang memiliki hambatan fisik maka pembelajaran diluar kelas dibatasi.

Analisis kebutuhan program dalam kurikulum inklusi di MTs Yabika dilakukan sejak pendaftaran atau penerimaan siswa baru dilakukan identifikasi dengan

wawancara terhadap siswa dan guru serta assessment yang dilakukan dengan treatment yang disesuaikan dengan hambatan yang dihadapi, selanjutnya guru kelas dan guru pembimbing.

#### **4.2.3. Pencapaian Program Kurikulum Madrasah**

##### **Inklusi**

Menurut Hamid Hasan, bahwa Evaluasi kurikulum menjadi suatu kegiatan yang tersistematis dalam pengumpulan informasi mengenai kurikulum yang menjadi pertimbangan terhadap nilai kurikulum dalam konteks tertentu, hal tersebut memberikan pengertian bahwa informasi tambahan yang disusun dalam bentuk kurikulum akan menghasilkan nilai dari kurikulum itu sendiri. Evaluasi membutuhkan proses, dimana proses yang dijalankan guna melihat sejauh mana keberhasilan dicapai berdasarkan kesesuaian antara efektifitas dan efisiensi yang diterapkan, sehingga dapat dilihat program yang dihasilkan dirasakan manfaat dan dampak yang dirasakannya.



## Program Kurikulum Madrasah Inklusi

Penggunaan model CIPP dalam evaluasi yang dipelopori oleh Daniel Stuffleabem bertujuan untuk mengevaluasi penilaian terhadap pendidikan, dimana menurut Stufflebean, adapun komponen di dalam model CIPP dengan tujuan antara lain, kontek yang melakukan evaluasi terfokus pada intuisi dengan melakukan identifikasi peluang melalui penilaian tentang kebutuhan; input dengan memfokuskan pada penentuan alternatif dengan pendekatan yang lebih tepat untuk kebutuhan identifikasi; proses yang berkaitan dengan seluruh proses dan penilaian pada pelaksanaan program, serta produk yang berkaitan terhadap penilaian hasil program yang berjalan.

Implementasi kurikulum perlu evaluasi pelaksanaannya dengan pendekatan komponen atau aspek kurikulum yang akan dievaluasi dengan menggunakan komponen CIPP yang masuk didalamnya sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi pengguna dan pelaksana kurikulum

adanya peran kepemimpinan kepala sekolah, peran guru dan orang tua siswa saling memberikan tanggapan (*respons*) sesuai dengan fungsinya.

Analisis kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs Yabika memiliki kepemimpinan yang sangat baik, pegawai negeri yang diperbantukan dari Departemen Agama dan dibantu oleh wakil kepala bidang kurikulum juga pegawai negeri serta orang tua siswa di di MTs Yabika ekonominya sangat mendukung untuk jalannya pendidikan. Penerimaan siswa hingga evaluasi kurikulum inklusi pimpinan selalu hadir; dan perhatiannya memberikan dorongan kepada guru, siswa dan orangtua siswa untuk bersama-sama melaksanakan pembelajaran. Konsultasi yang dilakukan rutin yang disampaikan pada rapat guru dan orang tua siswa. Di MTs Misbahussudur peran Kepala Madrasah cukup baik, bukan pegawai negeri. Banyak tugas yang didelegasikan kepada waka kurikulum. Peran Kepala Madrasah untuk evaluasi komitmen hadir dalam

konsultasi. Latar belakang orang tua MTs Misbahussudur ekonominya kurang mendukung.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia pada MTs Yabika relatif lengkap gedung bertingkat didukung dengan tenaga pengajar yang banyak serta guru bantu dari departemen agama ada 4 (empat Orang) pegawai negeri. dengan MTs Misbahussudur dikarenakan MTs Yabika sejak tahun 2015 dijadikan pilot project oleh Kementerian Agama RI bekerjasama dengan USAID dan UNTIRTA sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan MTs Misbahussudur yang bukan menjadi bagian dari pilot project dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga pembelajaran kelas inklusif berjalan apa adanya dengan sarana prasarana yang sama dengan kelas regular lainnya.

#### **4.2.3. Daya Dukung Kurikulum Madrasah Inklusi :**

- ✓ Yayasan mempunyai kepedulian terhadap pemerataan pendidikan

- ✓ Motivasi orang tua wali murid
- ✓ Aktivitas Siswa
- ✓ Pelaksanaan Program

#### **4.2.4. Hambatan Pelaksanaan Kurikulum Madrasah**

Inklusi :

- ✓ Tidak ada payung hukum yang jelas
- ✓ Tidak Tenaga pengajar khusus
- ✓ Kurang pembimbing atau pendamping
- ✓ Sarana prasarana
- ✓ Pembinaan dan pengawasan dari kemenag
- ✓ Penyetaraan ijazah kelulusan
- ✓ Tidak ada program berkelanjutan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kurikulum di madrasah inklusi

Pencapaian program kurikulum madrasah inklusi

Daya dukung terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi

Hambatan terlaksananya program kurikulum madrasah inklusi antara lain tenaga pengajar dan pembimbing atau pendamping, sarana prasarana, pembinaan dan pengawasan dari kementerian agama, dukungan orang tua dan penyetaraan ijazah kelulusan.

#### 5.2. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi, 2017. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Akhmad Hidayatullah Al Arifin. 2017. Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 1(1), 72-82
- Amri, S. Loeloe dan Endah Poerwati. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Arikunto, Suharsimi dan Safruddin Abdul Jabar, Cepi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Penyelenggara Pendidikan Khusus Provinsi Banten, 2016. *Laporan Pendidikan Inklusi Provinsi Banten 2016*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten

- Blaine R. Worthen and James R. Sanders, 1974.  
*Educational Evaluation Theory and Practice*. Ohio:  
Charles A. Publishing Company
- Dakir, 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*.  
Jakarta: Rineka Cipta
- Daryanto, 2011, *Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin  
Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media
- Dedi Ilham Perdana. 2016. Kurikulum dan Pendidikan  
di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan yang  
Ideal di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan  
Penguasa Semata. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2(1), 63-  
74
- Depdikbud, 1994. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum,  
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian*, Jakarta: Depdikbud
- Dinas Sosial Provinsi Banten, 2015. *Dinas Sosial Banten  
dalam Angka 2015*. Serang: Dinsos Banten
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2016. *Surat  
Keputusan Penetapan 22 Madrasah Inklusi*. Jakarta:  
Kemenag RI

- Dimiyati dan Mudjiono, 1995. *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dirjen Perti Depdikbud, 1990. *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Perti
- E.E. Sugiarto, 1996. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Makalah, Jakarta: Depdikbud
- Fadillah, Muhammad. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Famahato Lase, 2015. Dasar Pengembangan Kurikulum Menjadi Pengalaman Belajar. *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai 1(2)*, 130-140.
- Fathurrohman, Muhammad. 2015. *Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Kalimedia
- Fitri Wahyuni, 2015. Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(2), 231-242



- Friend, Marilyn & Bursuck, D William. 2015. Menuju Pendidikan Inklusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gede Danu Setiawan. 2019. Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Dengan Model CIPP di SMA Negeri 2 Singaraja. *DAIWI WIDYA: Jurnal Pendidikan* 06(1), 26-39.
- Gilbert Sax. 1980. *Principle of Education and Psychological Measurement an Evaluation*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.Ltd
- Haryono, Yuliana Retno Dwi W dan Totok Sumaryanto Florentinus. 2018. The Evaluation of the CIPP Model in The Implementation of Character Education at Junior High School. *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* 7 (2), 65-77
- Hasan Baharun. 2017. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid. Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1-26.
- Hasan, Hamid. S. 2014. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

- Hermanto. 2010. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 6(1), 65-82.
- Hery Nugroho dan Ni Ketut Suriati. 2019. Studi Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti Dalam Implementasi KTSP di SMP Negeri Kabupaten Gianyar. *Jurnal Visipena* 10(2), 164-175.
- Kadir, Abd. 2015. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1-22.
- Khasanah SZ dan Arifin Z. 2017. Implementasi Pengembangan Kurikulum di SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta. *Tadris* 12(1), 79-91.
- Leydhi Andhita. 2018. Meningkatkan Hasil Belajar PPkn Melalui Model Pembelajaran Numbered Heads Together Berbasis Kurikulum 2013. *Wacana Akademika* 2(1), 85-98.
- Lubis, M. 2016. Kesiapan Para Guru sebagai Pengembang Kurikulum dalam Merespon

- Perubahan Kurikulum. *International Management Confrence 2016 Proceedings* 1(1), 461-466.
- M. Ngalim Purwanto, 1997. *Prinsip prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M.Ngalim Purwanto, 1998. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhibbin Syah, 1999. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mursell L. James, 1995. *Pengajaran Berhasil*, terjemahan LP. Simanjuntak, Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Melda Fajra, Nizwardi Jalinus, Jalius Jama dan Oskah Dakhi. 2020. Pengembangan Model Kurikulum Sekolah Inklusi Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan Anak Didik. *Jurnal Pendidikan*, 21(1), 51-63
- Nana Sudjana, 2001. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugraha, E. & Syarifudin, E. 2020. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kurikulum 2013

di SMP Negeri Se-Kota Serang. *Jurnal Visipena* 11(2),  
228-242

Nurul Hidayati Rofiah, Dara Sudiraharja & Ediyanto.  
2020. The Implementation Inclusive Education:  
Implication for Children with Special Needs in  
Tamansari Elementary School in Yogyakarta.  
*International Journal on Education, Management and  
Innovation (IJEMI)*, 1(1), 82-90

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
Madrasah. Jakarta: Kemenag RI

R.L. Thorndike & E.P. Hagen, 1977. *Measurement and  
Evaluation in Psychology and Education*, New York:  
John Willey & Sons

Roger Kaufman dan Susan Thomas, 1980. *Evaluation  
Without Fear*, New York: New Viewpoints

Sangadji, Kapraja. 2014. Evaluasi Model CIPP untuk  
Evaluasi Pengembangan KTSP Pada Jenjang  
Pendidikan Persekolahan. *Jurnal Biology Science &  
Education* 3(1), 79-88

- Scarvia B. Anderson, Samuel Ball, Richard T, Murphy, 1981. *Encyclopedia of Educational Evaluation*, San Francisco: Jossey Bass Publisher
- Slarneto, 1998. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta.PT. Rineka Cipta
- St. Vembriarto dkk., 1994. *Kamus Pendidikan*, Jakarta: Grasindo
- Stufflebean, DI, 2012. *Educational Evaluation and Decision Making*. Ithaca: Peacock
- Subari, 1998. *Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suci, R. 2012. *Pedoman Umum Inklusi*. [Online]. Diakses pada tanggal 24 November 2020 dari <http://succiraye.blogspot.com/2012/12/pedoman-umum-pendidikan-inklusi.html>
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

- Suharsini Arikunto, 1997. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007. *Pengembangan Kurikulum, Praktek dan Teori*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumarni. 2019. Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Madrasah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2), 2019, 148-161
- Sutabri, T. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Syaiful Bahri Djamarah, 2002. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsul Huda Rohmadi. 2016. Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah (Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam). *Jurnal Education: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 193-208
- The Encyclopedia Americana*, 1989. Grolier Incorporated, Danbury-Connecticut
- Titi Setiawati, Listyaningsih dan Syarifah Rahmi Aziizi. 2017. Implementasi Peraturan Gubernur Banten

Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Provinsi Banten (Studi Pada Sekolah Inklusi di Kota Serang) *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 1-10

Toeti dan Udin Saripudin W. 1995. *Teori Belajar dan Model Pembelajaran*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud

Trisnawati, Leni Anggraenim dan Arief Budi Wicaksono, 2019. Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat SLTA di Kabupaten Pringsewu Menggunakan Model CIPP. *Proceeding of Biology Edsucation*, 3(1), 74-83

Umi Muzayanah. 2016. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Keji Ungaran Jawa Tengah, *Jurnal PENAMAS*, 29(2), 211-226

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemdikbud RI

W.S. Winkel. 1999. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Grarnedia Widisarana Indonesia

- William A, Mehrens dan Irvin J, Lehmans. 1973, *Measurement and Evaluation in Education and Psychology*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- In
- Winarso, Widodo. 2015. *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Bandung: CV. Confident
- Zulfakhri Sofyan, Bedjo Sujanto dan Muchlis R. Luddin. 2019. CIPP Model Evaluation of the 2013 Curriculum Implementation Training Program in Jakarta-Indonesia (Case Study: Islamic Educational Supervisor). *Asian Social Science* 15(12), 20-28
- Zumrotul Mukaffa. 2017. Pengembangan Model Madrasah Inklusi (Studi Atas Kesiapan Dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusi MI Al-Hidayah Margorejo Surabaya). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1-30



## LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di  
Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Anak Berkebutuhan Khusus (Jiwa)
1	Kabupaten Pandeglang	1151
2	Kabupaten Lebak	1439
3	Kabupaten Tangerang	855
4	Kabupaten Serang	1233
5	Kota Tangerang	520
6	Kota Cilegon	56
7	Kota Serang	150
8	Kota Tangerang Selatan	154
<b>Jumlah</b>		<b>5558</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2015

**Tabel 2. Jumlah Sekolah Inklusi di Provinsi Banten**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa
		SD	SMP	
1	Kabupaten Pandeglang	11	3	771
2	Kabupaten Lebak	29	2	41
3	Kabupaten Tangerang	2	-	334
4	Kabupaten Serang	13	-	394
5	Kota Tangerang	21	2	94
6	Kota Cilegon	4	3	16
7	Kota Serang	-	1	125
8	Kota Tangerang Selatan	5	1	214
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>12</b>	<b>896</b>

Sumber: BPPK Provinsi Banten, 2016

**Tabel 3. Jumlah Madrasah Inklusi di Provinsi Banten**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	
		MI	MTs
1	Kabupaten Pandeglang	-	-
2	Kabupaten Lebak	-	-
3	Kabupaten Tangerang	-	2
4	Kabupaten Serang	1	1
5	Kota Tangerang	-	-
6	Kota Cilegon	-	-
7	Kota Serang	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>

**Sumber: Kemenag RI, 2016**